



bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan - Akuntabel - Kompeten - Harmonis - Loyal - Adaptif - Kolaboratif



**DISNAKER
SURAKARTA**

PROFIL

Dinas Tenaga Kerja

KOTA SURAKARTA

2024



IKI TOP
“INTEGRITAS KORSA IKHLAS TANGGUH OPTIMIS PROFESIONAL”



**DISNAKER
SURAKARTA**

PROFIL

Dinas Tenaga Kerja

KOTA SURAKARTA

2024

IKI TOP
“INTEGRITAS KORSA IKHLAS TANGGUH OPTIMIS PROFESIONAL”

TIM PENYUSUN

Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta

Widyastuti Pratiwiningsih, S.IP., M.M.

Dr. Wahyu Indianto, S.E., M.H.

Evi Mahanani Avianto, S.E., M.M.

Sri Winarni, S.K.M.

Iryan Dwi Siswaningsih, S.Sos., M.Si.

Hirmali Saptaji, S.Psi.

Gurun Sarwono, S.H., M.Si.

Sumariyani, S.E., M.M.

Moses Kornelis Watratan, S.E., M.Si.

Estie Susanti, S.T.



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Buku Profil Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta tahun 2024 dapat tersusun dengan baik dan maksimal.

Penyusunan Buku Profil Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta ini mengacu kepada data-data yang terkumpul dari Organisasi Perangkat Daerah Kota Surakarta, institusi/lembaga terkait, dan masyarakat sampai dengan tahun 2023. Buku profil ini sebagai media yang menyajikan data dan informasi tentang kapasitas, sarana prasarana, dan capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta, diharapkan dapat mendukung pencapaian program pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Kota Surakarta.

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat serta pihak-pihak yang membutuhkan dengan mudah dan cepat, maka disusunlah Buku Profil Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta ini secara sistematis, efektif, dan efisien.

Dengan disusunnya Buku Profil Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta ini, diharapkan Dinas Tenaga Kerja dapat meningkatkan kualitas pelayanan di bidang ketenagakerjaan di Kota Surakarta. Mulai dari peningkatan kapasitas tenaga kerja, penyediaan lapangan kerja, sampai dengan perlindungan tenaga kerja.

Surakarta, Juli 2024

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta



Widyastuti Pratiwiningsih, S.I.P., M.M.

NIP. 197210281992032007

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
TIM PENYUSUN	ii
FOTO PERSONIL DINAS TENAGA KERJA KOTA SURAKARTA	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB 1: PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang	2
b. Tujuan	3
c. Ruang Lingkup	4
BAB 2: GAMBARAN UMUM DINAS TENAGA KERJA KOTA SURAKARTA	5
a. Visi dan Misi	6
b. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja	7
c. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja	8
d. Jumlah SDM Dinas Tenaga Kerja	11
e. Penghargaan Dinas Tenaga Kerja	27
f. Inovasi Dinas Tenaga Kerja	28
BAB 3: CAPAIAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA	33
BAB 4: DATA CAPAIAN KEGIATAN PER BIDANG DAN SEKRETARIAT	65
BAB 5: PENUTUP	93

DAFTAR TABEL

GAMBARAN UMUM DINAS TENAGA KERJA KOTA SURAKARTA

Tabel 2.1	Jumlah ASN dan Non ASN menurut Status Kepegawaian	6
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin	13
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai menurut Usia	15
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai menurut Bidang	18
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan	21
Tabel 2.6	Jumlah Pegawai menurut Golongan	23
Tabel 2.7	Jumlah Pegawai menurut Jabatan	25
Tabel 2.8	Penghargaan Dinas Tenaga Kerja	27
Tabel 2.9	Inovasi Digital Dinas Tenaga Kerja	28
Tabel 2.10	Inovasi Non Digital Dinas Tenaga Kerja	31

CAPAIAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA

Tabel 3.1	Predikat Capaian Kinerja	34
Tabel 3.2	Target dan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta berdasarkan Renstra	35
Tabel 3.3	Target dan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta berdasarkan RPJMD	36
Tabel 3.4	Target dan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta berdasarkan SIPD	37
Tabel 3.5	Target dan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta berdasarkan SDGs	41
Tabel 3.6	Target dan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta berdasarkan LPPD Output	42
Tabel 3.7	Target dan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta berdasarkan LPPD Outcome	48
Tabel 3.8	Jumlah Perusahaan yang Memenuhi Masing-masing Kriteria Tata Kelola Kerja yang Layak Kota Surakarta 2023	57

DATA CAPAIAN KEGIATAN PER BIDANG DAN SEKRETARIAT

Tabel 4.1	Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta	67
Tabel 4.2	Standar Operasional Prosedur Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta	74
Tabel 4.3	Standar Pelayanan Publik Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta	75
Tabel 4.4	Gambaran Umum Ketenagakerjaan Kota Surakarta tahun 2023	77
Tabel 4.5	Pencapaian Bidang Perencanaan dan Produktivitas Tenaga Kerja tahun 2023	78
Tabel 4.6	Penempatan Tenaga Kerja di Kota Surakarta tahun 2023	80
Tabel 4.7	Perusahaan yang Memberikan Peluang Kerja untuk Kaum Disabilitas di Kota Surakarta tahun 2023	81
Tabel 4.8	Jumlah Perusahaan di Kota Surakarta Tahun 2023	83
Tabel 4.9	Pencapaian Bidang Hubungan Industrial Tahun 2023	84
Tabel 4.10	Sektor dengan Jumlah Aduan Terbanyak di Tahun 2023	86
Tabel 4.11	Sektor dengan Jumlah Perselisihan Terbanyak di Tahun 2023	86

LAMPIRAN

Tabel 6.1	Target dan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta Tahun 2022 berdasarkan Renstra	98
Tabel 6.2	Target dan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta Tahun 2023 berdasarkan Renstra	106

DAFTAR GAMBAR

GAMBARAN UMUM DINAS TENAGA KERJA KOTA SURAKARTA

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta	8
Gambar 2.2	Grafik Jumlah ASN dan Non ASN menurut Status Kepegawaian	12
Gambar 2.3	Grafik Persentase Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin	14
Gambar 2.4	Grafik Persentase Jumlah Pegawai menurut Usia	16
Gambar 2.5	Grafik Persentase Jumlah Pegawai menurut Bidang	19
Gambar 2.6	Grafik Persentase Jumlah Pegawai menurut Bidang	22
Gambar 2.7	Grafik Persentase Jumlah Pegawai menurut Golongan	24
Gambar 2.8	Grafik Persentase Jumlah Pegawai menurut Jabatan	26

DATA CAPAIAN KEGIATAN PER BIDANG DAN SEKRETARIAT

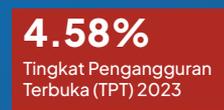
Gambar 4.1	<i>Capacity Building</i> bersama Serikat Pekerja/Serikat Buruh	86
Gambar 4.2	Kaji Banding Kelembagaan	86
Gambar 4.3	Uji Kompetensi Hubungan Industrial	87
Gambar 4.4	Posko Tunjangan Hari Raya 2023	87
Gambar 4.5	Lomba Olahraga LKS Tripartit	87
Gambar 4.6	Sidang Dewan Pengumpulan	87
Gambar 4.7	Sidang Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial	87
Gambar 4.8	Senam Bersama (Puncak <i>May Day</i> Tahun 2023)	87
Gambar 4.9	Bimbingan Teknis Struktur dan Skala Upah	88
Gambar 4.10	Monitoring Tunjangan Hari Raya 2023	88
Gambar 4.11	Forum Konsultasi Publik: Peninjauan ulang Standar Pelayanan	88
Gambar 4.12	Diskusi Kelompok Terbatas tentang Rencana Kerja	88
Gambar 4.13	Penerimaan Piagam Penghargaan: Capaian Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka terbaik Kabupaten/Kota se Jawa Tengah 2022	88
Gambar 4.14	Penerimaan Piagam Penghargaan: Capaian Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka terbaik Kabupaten/Kota se Jawa Tengah 2022	88

Gambar 4.15	Review Rencana Strategis	89
Gambar 4.16	Diskusi Kelompok Terbatas tentang Rencana Kerja	89
Gambar 4.17	Diskusi Kelompok Terbatas tentang Rencana Kerja	89
Gambar 4.18	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Kepegawaian	89
Gambar 4.19	Diskusi Kelompok Terbatas tentang Rencana Kerja	89
Gambar 4.20	Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian dan Manajemen Resiko	89
Gambar 4.21	Verifikasi Perjanjian Penempatan CPMI	90
Gambar 4.22	Rencana Tenaga Kerja Makro	90
Gambar 4.23	Pelatihan Kompetensi	90
Gambar 4.24	Job Fair Solo Career Expo	90
Gambar 4.25	Bimbingan Konsultasi Perusahaan	90
Gambar 4.26	Pengukuran Produktivitas	90
Gambar 4.27	LPK Verifikasi (Perizinan OSS)	91
Gambar 4.25	Bimbingan Teknis Bursa Kerja Khusus (BKK)	91
Gambar 4.26	Transmigrasi	91
Gambar 4.27	Pelayanan AK 1	91

BABI

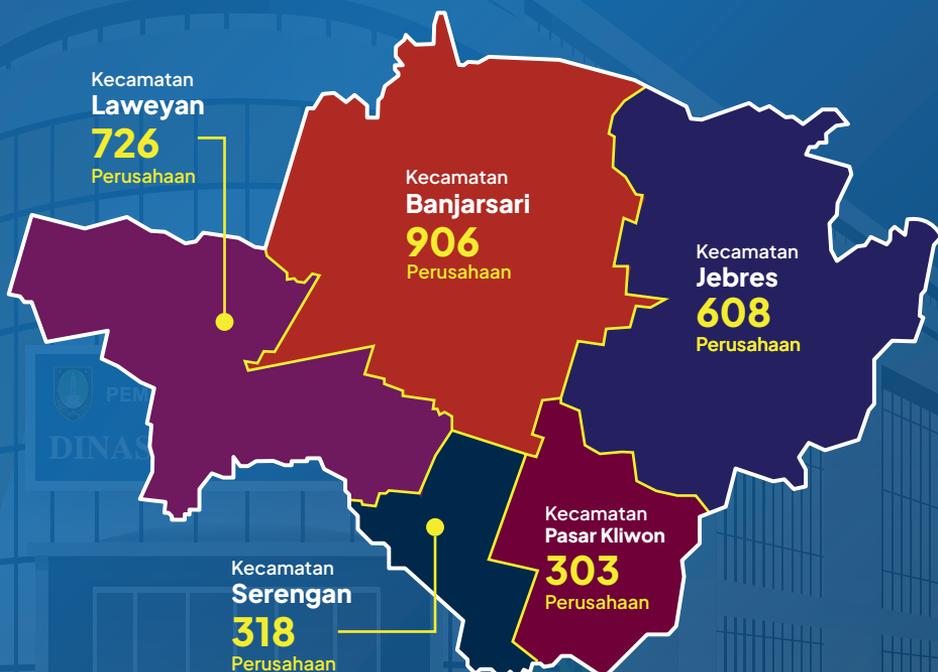
PENDAHULUAN

Gambaran Umum Ketenagakerjaan Kota Surakarta



Sumber: Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2023

Jumlah Perusahaan masing-masing Kecamatan di Kota Surakarta



PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang menetapkan kerangka dasar pembentukan instansi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Pembentukan Dinas Tenaga Kerja ini kemudian diperkuat oleh Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119), yang memberikan landasan hukum yang lebih spesifik dan terperinci mengenai struktur dan tugas Dinas Tenaga Kerja di Kota Surakarta.

Lebih lanjut, Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Surakarta memberikan panduan operasional yang jelas bagi Dinas Tenaga Kerja.

Peraturan ini menetapkan kedudukan Dinas Tenaga Kerja sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab besar dalam bidang ketenagakerjaan, dengan struktur Organisasi yang dirancang untuk mendukung efisiensi dan efektivitas kerja.

Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta memiliki tugas utama dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang ketenagakerjaan, termasuk peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja, penyediaan lapangan kerja, serta perlindungan hak-hak tenaga kerja. Dengan berlandaskan pada berbagai regulasi tersebut, Dinas Tenaga Kerja berkomitmen untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kota Surakarta dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing.

Seiring dengan dinamika pembangunan dan perkembangan kebutuhan masyarakat, Dinas Tenaga Kerja terus melakukan berbagai inovasi dan penguatan program kerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas program-program ketenagakerjaan. Melalui kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun lembaga pendidikan, Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan kondusif bagi seluruh tenaga kerja di Kota Surakarta.

B. Tujuan

Tujuan disusunnya Buku Profil Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta adalah:

1. Memberikan penjelasan secara rinci tentang potensi sumber daya dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta.
2. Memberikan data informasi mengenai capaian kerja, sasaran, strategi Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta dalam mewujudkan visi dan misi Wali Kota Surakarta.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada Buku Profil Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta adalah:

1. Gambaran umum Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta; berupa Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Jumlah SDM, Penghargaan, dan Inovasi.
2. Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta; berupa capaian kinerja yang sesuai dengan indikator yang ada di dokumen RPJMD, RENSTRA, LPPD, SIPD, dan SDGs.
3. Capaian Kegiatan Per Bidang dan Sekretariat Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta; berupa data capaian kegiatan per bidang dan sekretariat beserta foto kegiatan dan narasi penjelasannya.

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS TENAGA KERJA KOTA SURAKARTA

Jumlah Aparatur Sipil Negara
dan Non Aparatur Sipil Negara
Menurut Status Kepegawaian

Sumber: Dinas Tenaga Kerja 2023

2022



Aparatur Sipil Negara	: 31
Non Aparatur Sipil Negara	: 12
<hr/>	
Jumlah	: 43



2023



Aparatur Sipil Negara	: 32
Non Aparatur Sipil Negara	: 12
<hr/>	
Jumlah	: 44



A. Visi dan Misi Pemerintah Kota Surakarta

VISI

MEWUJUDKAN SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA YANG MODERN, TANGGUH, GESIT, KREATIF DAN SEJAHTERA.

MISI

Misi 1

Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan.

Misi 2

Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan.

Misi 3

Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan.

Misi 4

Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga.

Misi 5

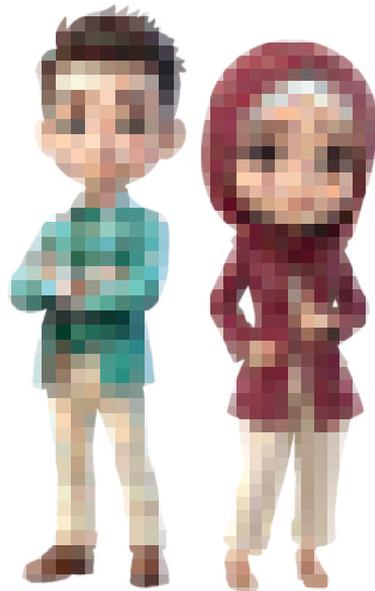
Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan.

Misi 6

Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif.

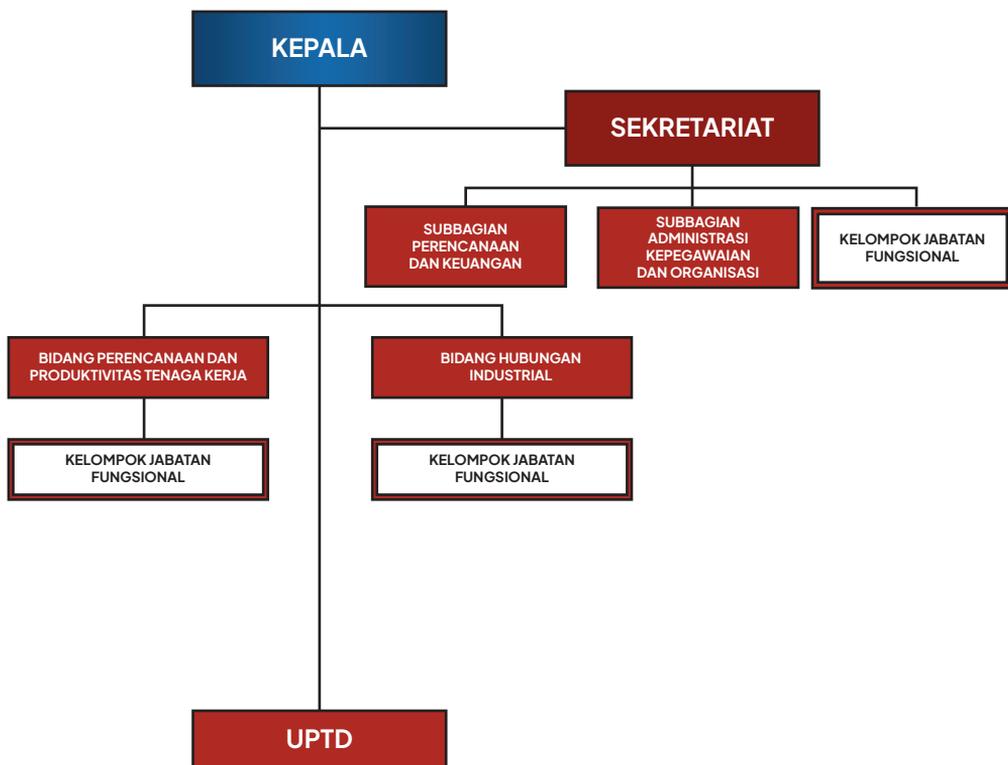
Misi 7

Mewujudkan kondusifitas daerah dan kerukunan antar umat Beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati.



B. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Surakarta nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah, dibentuklah Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta dengan struktur Organisasi sebagai berikut:



Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta

C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta dan untuk mewujudkan Renstra tahun 2021–2026 diarahkan untuk mewujudkan Visi Kota Surakarta yaitu:

MEWUJUDKAN SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA YANG MODERN, TANGGUH, GESIT, KREATIF DAN SEJAHTERA.

Mengacu pada Visi dan Misi tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta mengacu pada Visi Pemerintah Kota Surakarta, bertumpu pada prinsip–prinsip:

Pelaksanaan secara multi sektoral dan integral;

Pendekatan holistik dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi dan ekologi;

Pelaksanaan di lapangan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat;

Pembangunan yang bertumpu pada kepentingan masyarakat dengan menerapkan prinsip efisiensi, akuntabilitas, transparan dan partisipatif;

Berorientasi Nasional dan internasional dengan berpijak pada kepentingan lokal serta penajaman peran institusi Lingkungan Hidup.

Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta sudah diatur di Peraturan Wali Kota Surakarta nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah:

TUGAS

Melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

FUNGSI

01. Perumusan kebijakan terkait Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
02. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
03. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
04. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi;

05.

Pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta Organisasi dan kepegawaian; dan

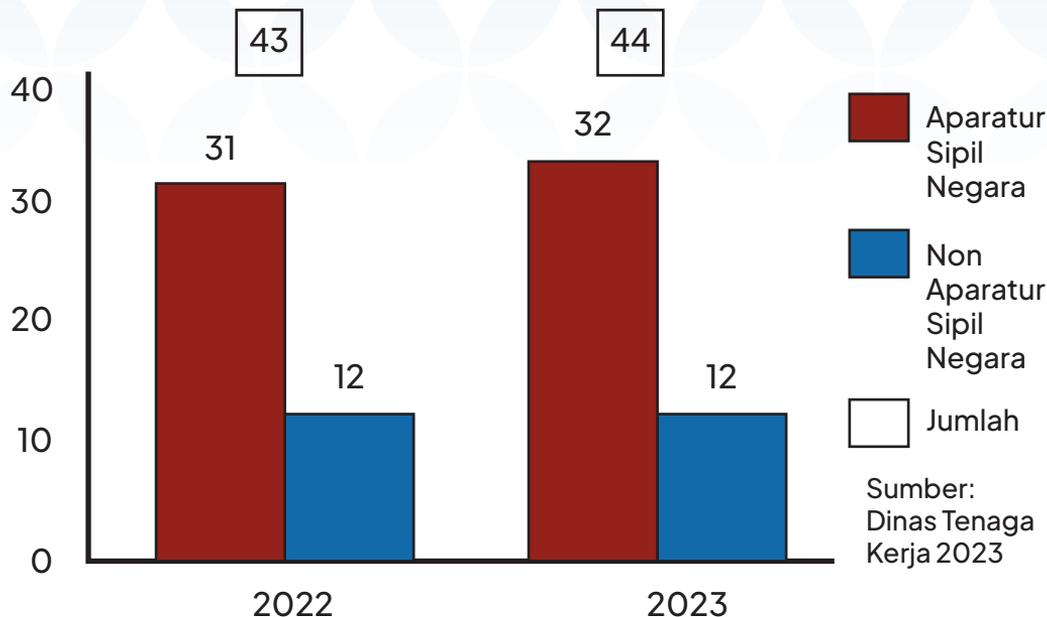
06.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

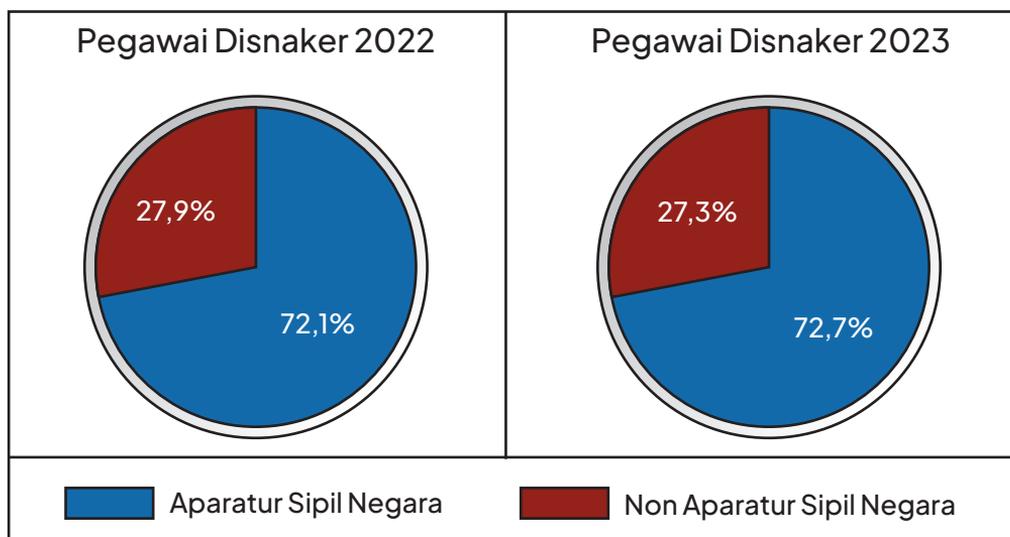
D. Jumlah SDM Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta

Sumber Daya Manusia di Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta adalah seluruh aparatur yang terdaftar di Perangkat Daerah dilihat dari jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian, jenis kelamin, usia, bidang, pendidikan, pangkat/golongan, dan jabatan.

01 Jumlah ASN dan Non ASN menurut Status Kepegawaian



Tabel 2.1. Jumlah Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara menurut Status Kepegawaian



Gambar 2.2. Grafik Persentase Jumlah Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara menurut Status Kepegawaian

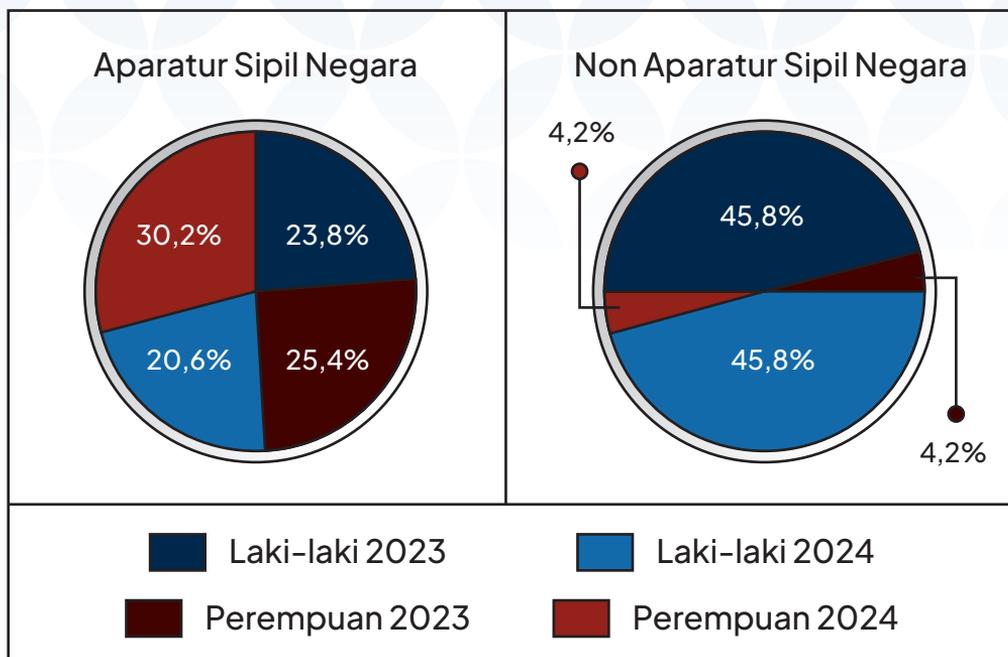
Dilihat dari tabel dan gambar 2.1, dapat diketahui bahwa komposisi pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta menurut status kepegawaian adalah sebagai berikut: Untuk pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dari tahun 2022 ke tahun 2023, persentasenya naik sebesar 0.6%. Sedangkan untuk pegawai berstatus Non ASN dari tahun 2022 ke tahun 2023, persentasenya turun sebesar 0.6%.

02 Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin

No	Kelompok	2022		2023	
		Aparatur Sipil Negara	Non Aparatur Sipil Negara	Aparatur Sipil Negara	Non Aparatur Sipil Negara
1.	Laki-laki	15	11	13	11
2.	Perempuan	16	1	19	1
Jumlah		31	12	32	12

Sumber: Dinas Tenaga Kerja 2023

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin



Gambar 2.3. Grafik Persentase Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin

Dari tabel dan gambar 2.2, dapat diketahui bahwa komposisi pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut: Untuk status kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai dengan jenis kelamin laki-laki dari tahun 2022 ke tahun 2023 persentasenya turun sebanyak 3.2%, sedangkan pegawai dengan jenis kelamin perempuan dari tahun 2022 ke tahun 2023 persentasenya naik sebanyak 4.8%.

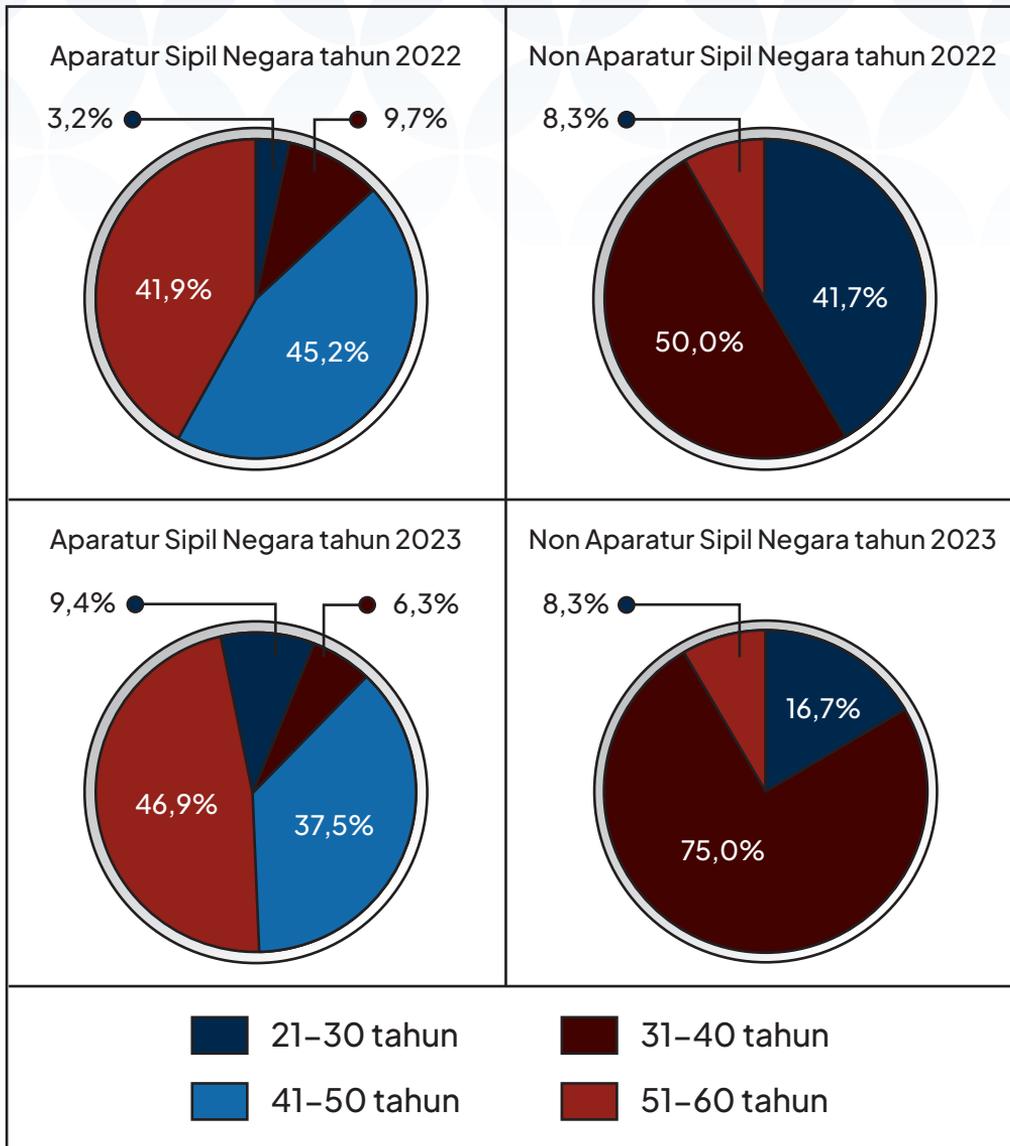
Sedangkan untuk status kepegawaian Non ASN, pegawai dengan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan bersifat stabil, tidak terjadi kenaikan maupun penurunan.

03 Jumlah Pegawai menurut Usia

No	Usia	Jenis Kelamin	Aparatur Sipil Negara		Non Aparatur Sipil Negara		Total	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Dibawah 20 tahun	Laki-laki	-	-	-	-	-	-
		Perempuan	-	-	-	-	-	-
2.	21-30 tahun	Laki-laki	-	-	4	1	4	1
		Perempuan	1	3	1	1	2	4
3.	31-40 tahun	Laki-laki	1	-	6	9	7	9
		Perempuan	2	2	-	-	2	2
4.	41-50 tahun	Laki-laki	9	8	-	-	9	8
		Perempuan	5	4	-	-	5	4
5.	51-60 tahun	Laki-laki	5	5	1	1	6	6
		Perempuan	8	10	-	-	8	10
Jumlah			31	32	12	12	43	44

Sumber: Dinas Tenaga Kerja 2023

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai menurut Usia



Gambar 2.4. Grafik Persentase Jumlah Pegawai menurut Usia

Dilihat dari tabel dan gambar 2.3, dapat diketahui bahwa komposisi pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta menurut usia adalah sebagai berikut: Untuk status kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) dari tahun 2022 ke tahun 2023, pegawai dengan umur 21–30 tahun persentasenya naik sebanyak 6.2%, pegawai dengan umur 31–40 tahun persentasenya turun sebanyak 3.4%, pegawai dengan umur 41–50 tahun persentasenya turun sebanyak 7.7%, sementara pegawai dengan umur 51–60 tahun persentasenya naik sebanyak 5%.

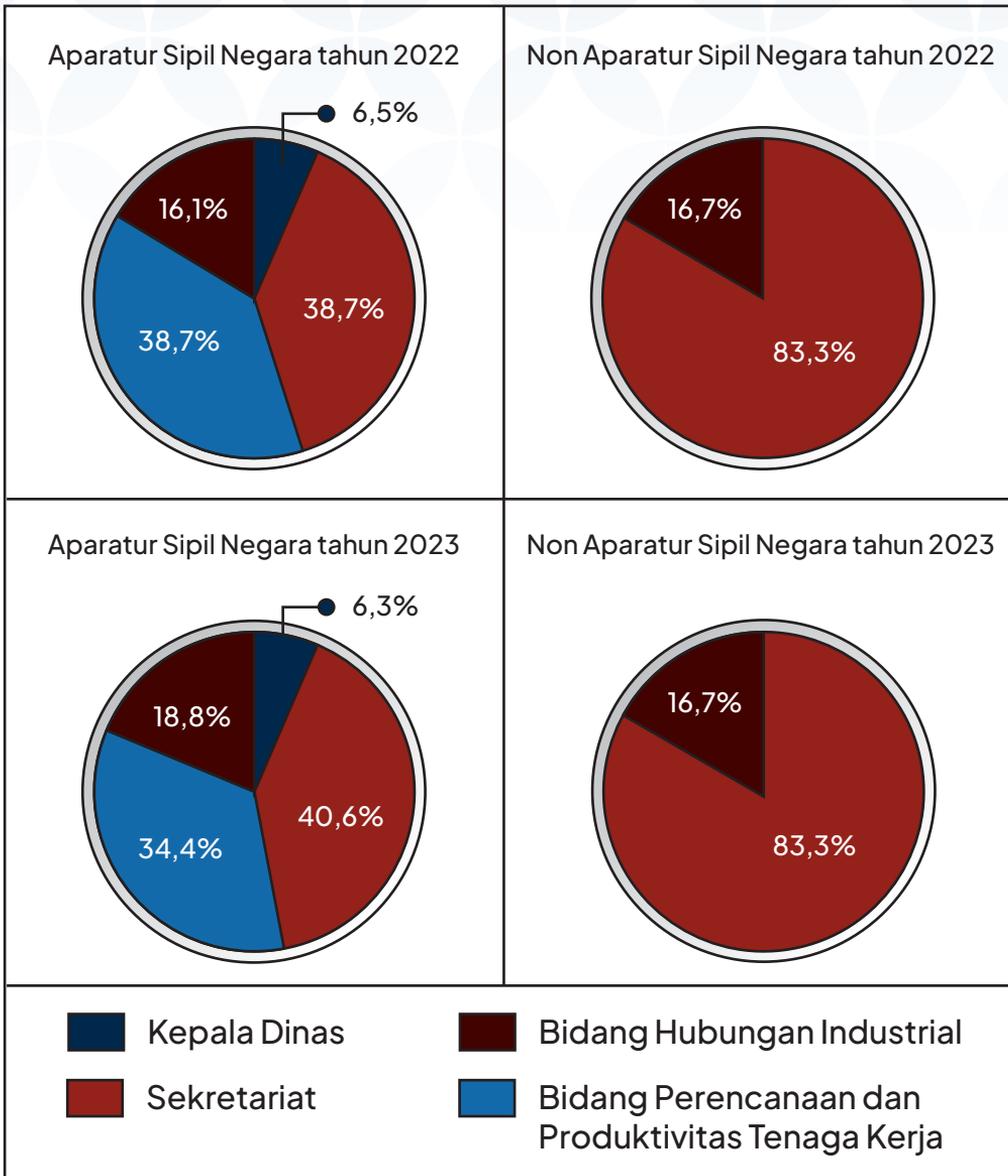
Untuk status kepegawaian Non ASN dari tahun 2022 ke tahun 2023, pegawai dengan umur 21–30 tahun persentasenya turun sebanyak 25%, pegawai dengan umur 31–40 tahun persentasenya naik sebanyak 25%, dan pegawai dengan umur 51–60 tahun persentasenya bersifat stabil, tidak kenaikan maupun penurunan.

04 Jumlah Pegawai menurut Bidang

No	Kelompok	Jenis Kelamin	Aparatur Sipil Negara		Non Aparatur Sipil Negara		Total	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Kepala Dinas	Laki-laki	0	0	-	-	0	0
		Perempuan	1	1	-	-	1	1
2.	Sekretariat	Laki-laki	9	9	9	9	18	18
		Perempuan	3	4	1	1	4	5
3.	Bidang Perencanaan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Laki-laki	2	1	-	-	2	1
		Perempuan	10	10	-	-	10	10
4.	Bidang Hubungan Industrial	Laki-laki	3	3	2	2	5	5
		Perempuan	2	3	-	-	2	3
Jumlah			31	32	12	12	43	44

Sumber: Dinas Tenaga Kerja 2023

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai menurut Bidang



Gambar 2.5. Grafik Persentase Jumlah Pegawai menurut Bidang

Dilihat dari tabel dan gambar 2.4, dapat diketahui bahwa komposisi pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta menurut bidang adalah sebagai berikut: Untuk status kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) dari tahun 2022 ke tahun 2023, pegawai yang bekerja di bidang Sekretariat persentasenya naik sebanyak 1.9%, pegawai yang bekerja di Bidang Perencanaan dan Produktivitas Tenaga Kerja persentasenya turun sebanyak 4.3%, dan pegawai yang bekerja di Bidang Hubungan Industrial persentasenya naik sebanyak 2.7%.

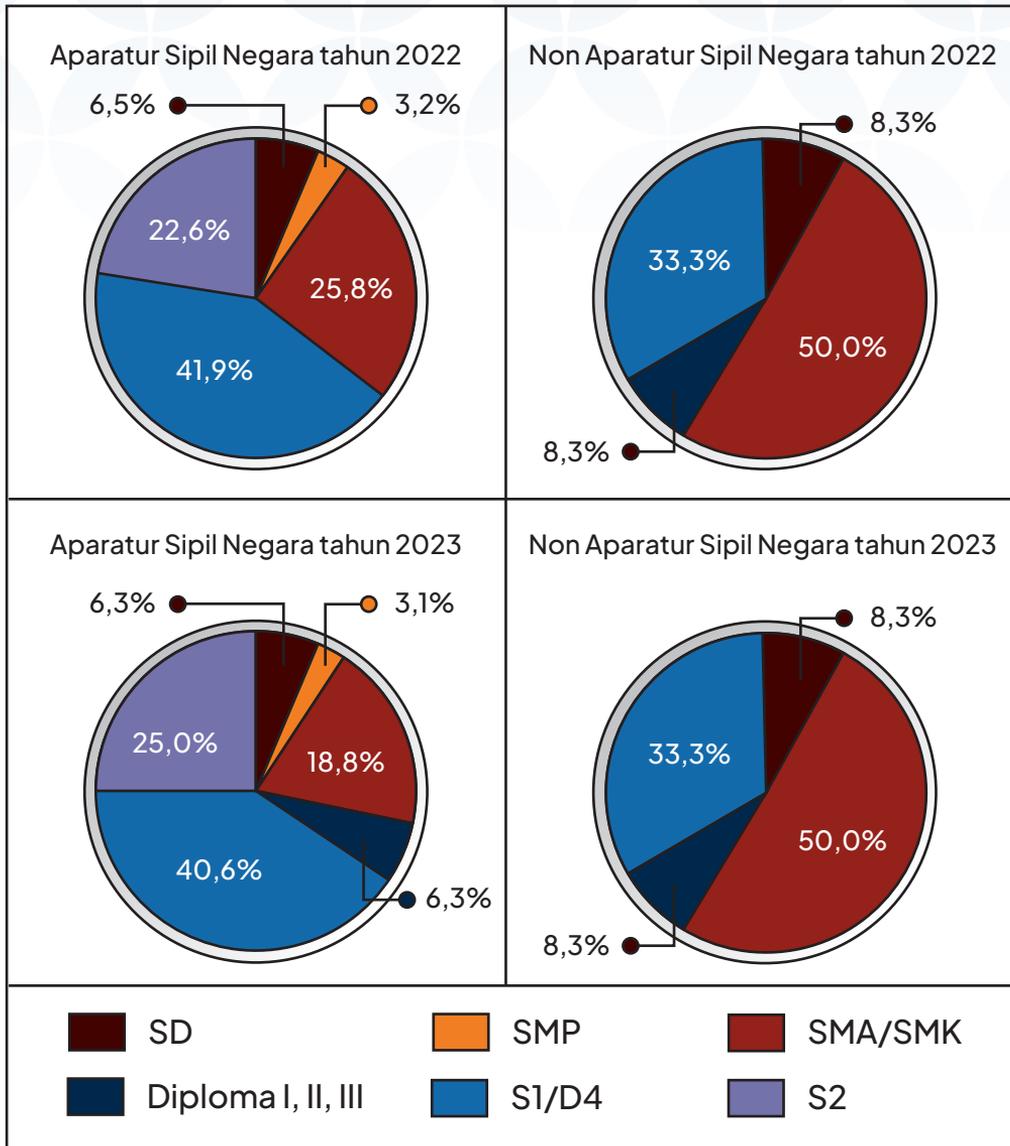
Untuk status kepegawaian Non ASN dari tahun 2022 ke tahun 2023, pegawai yang bekerja di bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan dan Produktivitas Tenaga Kerja, maupun Bidang Hubungan Industrial persentasenya bersifat stabil, tidak terjadi kenaikan maupun penurunan.

05 Jumlah Pegawai menurut Pendidikan

No	Kelompok	Jenis Kelamin	Aparatur Sipil Negara		Non Aparatur Sipil Negara		Total	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	SD	Laki-laki	2	2	1	1	3	3
		Perempuan	-	-	-	-	-	-
2.	SMP	Laki-laki	-	-	4	1	4	1
		Perempuan	-	-	-	-	-	-
3.	SMA SMK	Laki-laki	6	4	6	6	12	10
		Perempuan	2	2	-	-	2	2
4.	Diploma I, II, III	Laki-laki	0	1	1	1	1	2
		Perempuan	-	1	-	-	5	1
5.	S1 D4	Laki-laki	3	2	3	3	6	5
		Perempuan	10	11	1	1	11	12
6.	S2	Laki-laki	3	3	-	-	3	3
		Perempuan	4	5	-	-	4	5
Jumlah			31	32	12	12	43	44

Sumber: Dinas Tenaga Kerja 2023

Tabel 2.5. Jumlah Pegawai menurut Pendidikan



Gambar 2.6. Grafik Persentase Jumlah Pegawai menurut Bidang

Dilihat dari tabel dan gambar 2.5, dapat diketahui bahwa komposisi pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta menurut pendidikan adalah sebagai berikut: pada tahun 2022 ke tahun 2023 terdapat penambahan dan pengurangan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut pendidikan. Untuk SMA/SMK terdapat penurunan sebanyak 7%, Diploma I,II,III terdapat peningkatan sebesar 6,3%, Dan S2 terdapat peningkatan sebesar 2,4%.

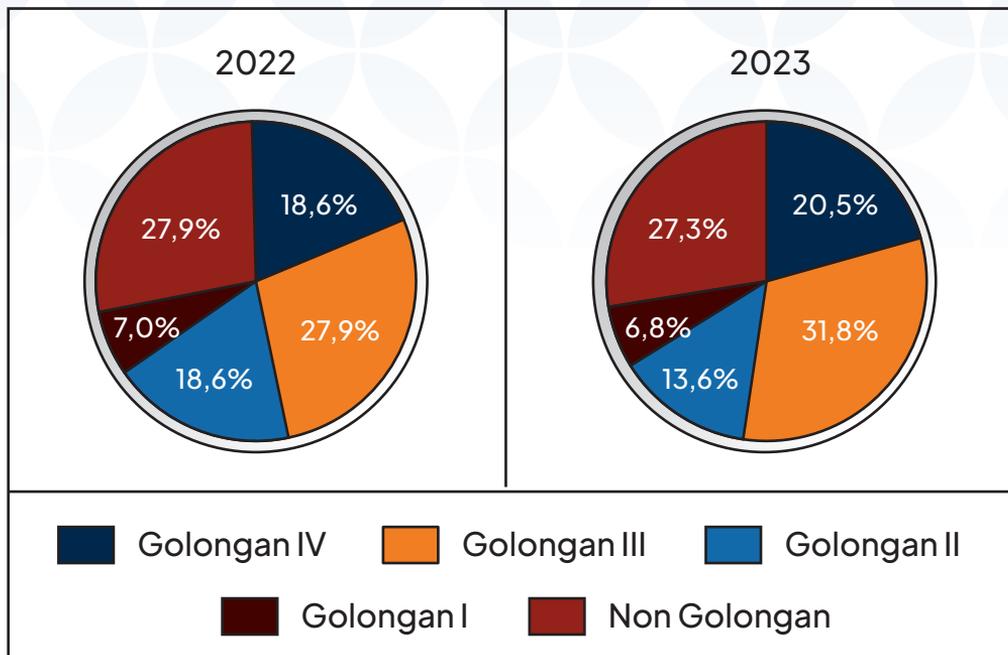
Untuk pegawai Non ASN dari tahun 2022 ke 2023, persentasenya bersifat stabil, tidak terjadi kenaikan maupun penurunan.

06 Jumlah Pegawai menurut Golongan

No	Kelompok	Jenis Kelamin	Tahun	
			2022	2023
1.	IV	Laki-laki	2	2
		Perempuan	6	7
2.	III	Laki-laki	4	4
		Perempuan	8	10
3.	II	Laki-laki	6	5
		Perempuan	2	1
4.	I	Laki-laki	3	3
		Perempuan	-	-
5.	Non Golongan	Laki-laki	11	11
		Perempuan	1	1
Jumlah			43	44

Sumber: Dinas Tenaga Kerja 2023

Tabel 2.6. Jumlah Pegawai menurut Golongan



Gambar 2.7. Grafik Persentase Jumlah Pegawai menurut Golongan

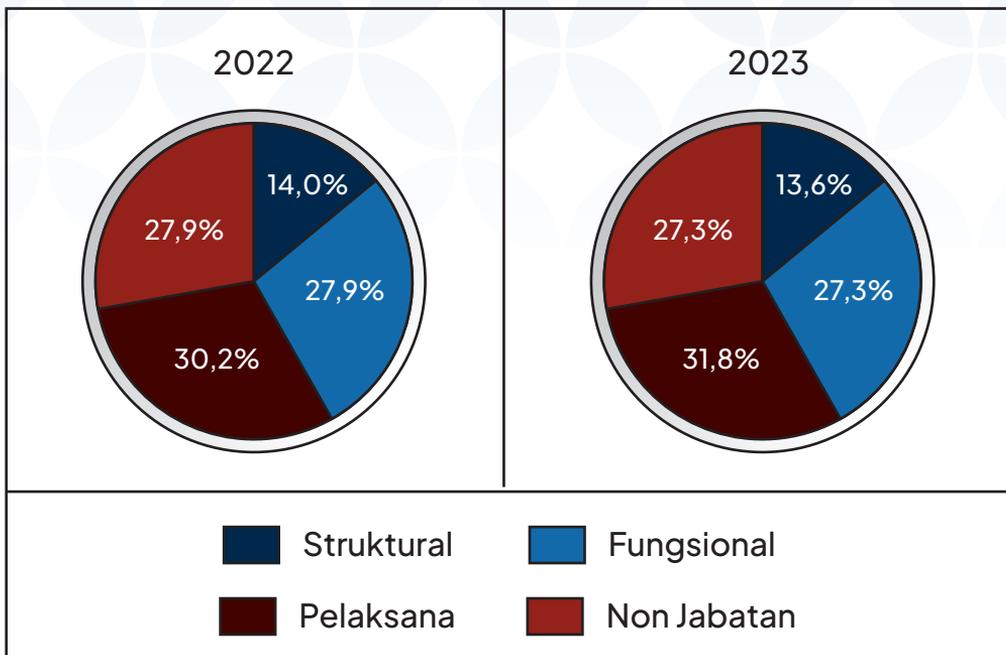
Dilihat dari tabel dan gambar 2.6, dapat diketahui bahwa komposisi pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta menurut golongan adalah sebagai berikut: jumlah pegawai pada tahun 2022 ke 2023 terdapat peningkatan dan penurunan, diantaranya golongan IV terdapat peningkatan sebesar 1,9%, golongan III terdapat peningkatan sebesar 3,9%, dan golongan II mengalami penurunan sebanyak 5%.

07 Jumlah Pegawai menurut Jabatan

No	Kelompok	Jenis Kelamin	Tahun	
			2022	2023
1.	Struktural	Laki-laki	2	2
		Perempuan	4	4
2.	Fungsional	Laki-laki	3	2
		Perempuan	9	10
3.	Pelaksana	Laki-laki	10	9
		Perempuan	3	5
4.	Non Jabatan	Laki-laki	11	11
		Perempuan	1	1
Jumlah			43	44

Sumber: Dinas Tenaga Kerja 2023

Tabel 2.7. Jumlah Pegawai menurut Jabatan



Gambar 2.8. Grafik Persentase Jumlah Pegawai menurut Jabatan

Dilihat dari tabel dan gambar 2.7, dapat diketahui bahwa komposisi pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta menurut jabatan adalah sebagai berikut: jumlah pegawai pada tahun 2022 ke 2023 terdapat peningkatan dari segi kelompok jabatan pelaksana sebanyak 1,8%. Untuk kelompok jabatan struktural, fungsional, dan non-jabatan, persentasenya bersifat stabil, tidak terjadi kenaikan maupun penurunan.

E. Penghargaan Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta

No	Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tanggal	Predikat
1.	Program Pengarusutamaan Gender	Pemerintah Kota Surakarta	18 September 2022	Juara 3
2.	Penganugerahan SIDDHAKARYA	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	28 Oktober 2022	Kategori Perusahaan Menengah
3.	Entitas Pelaporan Besar	Walikota Surakarta	7 November 2022	Juara 3
4.	Capaian Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terbaik Kabupaten Kota se Jawa Tengah 2022	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	24 Januari 2023	Terbaik

Tabel 2.8. Penghargaan Dinas Tenaga Kerja

F. Inovasi Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta

01 Inovasi Digital

No	Nama Inovasi	Bentuk Inovasi	Tujuan Inovasi	Tahun Inovasi
1.	SIAPDITATA (Sistem Informasi Pasar Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta)	Pelayanan Publik	<p>Tujuan dari adanya proses pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) tersebut dapat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk membantu dalam memfasilitasi Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta dalam menjalankan tugas pokoknya. 2. Untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan akses data dan informasi mengenai berbagai layanan peningkatan kualitas sumber daya manusia. 3. Untuk membantu memudahkan pengelolaan data dan informasi mengenai daya serap berbagai layanan peningkatan sumber daya manusia kepada masyarakat. 4. Untuk membantu menyediakan kebutuhan data dan informasi yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan dan pembuatan kebijakan terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah Kota Surakarta. 	2022

No	Nama Inovasi	Bentuk Inovasi	Tujuan Inovasi	Tahun Inovasi
2.	SIDHARTA (Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta)	Pelayanan Publik	Tujuan dari pembuatan Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusun data base dalam aplikasi tentang informasi perusahaan, kondisi lingkungan kerja, sistem pengupahan, peraturan perusahaan di Kota Surakarta. 2. Tersusun data base tentang jaminan kesejahteraan karyawan, keselamatan dan Kesehatan karyawan, jaminan sosial dan asuransi ketenagakerjaan, fasilitas ketenagakerjaan. 3. Tersusun data base tentang hubungan industrial yang terkait dengan serikat pekerja/serikat buruh, perselisihan hubungan industrial, pemogokan, penutupan perusahaan, pemutusan hubungan ketenagakerjaan. 4. Sistem informasi berbasis web pemanfaatannya mampu memberikan informasi kepada pemangku kebijakan daerah untuk merencanakan kegiatan dan monitoring serta evaluasi dalam hubungan industrial dan ketenagakerjaan. 5. Sistem informasi yang berbasis web akan mampu memberikan transparansi informasi kepada masyarakat luas. 	2023

No	Nama Inovasi	Bentuk Inovasi	Tujuan Inovasi	Tahun Inovasi
3.	SIMODIS (Sistem Monitoring Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta)	Monitoring Kinerja DISNAKER	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Rencana Strategis 2. Monitoring Aktivitas Dinas 3. Laporan Realisasi Keuangan dan Kinerja Dinas 4. Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah 5. Sinkronisasi Solo Data 	2022

Tabel 2.9. Inovasi Digital Dinas Tenaga Kerja

02 Inovasi Non Digital

No	Nama Inovasi	Bentuk Inovasi	Tujuan Inovasi	Tahun	
				2022	2023
1.	Prayoga Bhayanaka Ketenagakerjaan Award	Penghargaan	Menciptakan Hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan antara Pengusaha dan Pekerja di lingkup Kota Surakarta	Tata Kelola Ketenagakerjaan pada sektor: <ul style="list-style-type: none"> • Industri pengolahan • Perhotelan (bintang 1-3) • Organisasi SP/SB 	Tata Kelola Ketenagakerjaan pada sektor: <ul style="list-style-type: none"> • Rumah sakit • Yayasan pendidikan • Organisasi SP/SB
2.	Kampung Berdaya (Kami Pekerja Unggul Bersama dalam Upaya)	Pelatihan	Merupakan alternatif solusi pengentasan pengangguran melalui perluasan kesempatan kerja berbasis potensi kewilayahan.	Pelatihan Millenial Bootcamp Program Pelatihan Digital Branding di Kel. Kauman, Kec. Ps Kliwon dan di Kel. Mojosongo Kec. Jebres	Kampung Kompeten Produktif Bekerja sama dengan BPVP dan UMKM membangun potensi wilayah kampung kompeten di wilayah Kota Surakarta melalui pelatihan Barista dan Pastry
3.	DISNAKER Klinik Konsultasi	Pelayanan diluar jam kerja	Pelayanan kepada masyarakat Kota Surakarta mengenai pembuatan AK.1, konsultasi pemagangan dan konsultasi lainnya mengenai ketenagakerjaan dengan lebih santai dan dapat dilaksanakan di luar jam kerja seperti biasanya.	-	Dilaksanakan tiap minggu pagi, bertepatan dengan CFD di Depan Kantor DISNAKER Kota Surakarta pada Pukul 06.00-09.00 WIB

Tabel 2.10. Inovasi Non Digital Dinas Tenaga Kerja

BAB III

CAPAIAN KERJA DINAS TENAGA KERJA

Indikator

Persentase tenaga kerja bersertifikat

Predikat

2022: Tidak Berhasil
2023: Sangat Berhasil

1

Indikator

Persentase pengangguran yang ditangani

Predikat

2022: Sangat Berhasil
2023: Sangat Berhasil

2

Indikator

Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)

Predikat

2022: Tidak Berhasil
2023: Tidak Berhasil

3

Indikator

Nilai PMPRB

Predikat

2022: Sangat Berhasil
2023: Sangat Berhasil

4

Sangat Berhasil
 $n > 85$

Tidak Berhasil
 $n < 55$



Untuk pencapaian target indikator di tahun 2024, perlu dilakukan upaya antara lain:

- 1 Sosialisasi yang intensif dan bimbingan kepada perusahaan agar menerapkan tata kelola kerja yang layak di perusahaannya.
- 2 Melakukan pendataan yang menyeluruh kepada perusahaan yang bertempat/berwilayah di Kota Surakarta.
- 3 Melakukan pembinaan dan monitoring ke perusahaan yang bertempat/berwilayah di Kota Surakarta untuk memantau penerapan tata kelola kerja yang layak di perusahaan.

A. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran berupa skala ordinal dengan klasifikasi sebagai berikut:

Predikat	Nilai	Mean
Sangat Berhasil	$n > 85$	92.5
Berhasil	$70 < n \leq 85$	77.5
Cukup Berhasil	$55 < n \leq 70$	62.5
Tidak Berhasil	$n < 55$	62.5

Tabel 3.1. Predikat Capaian Kinerja

Pada tahun 2023, Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Berikut adalah capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta berdasarkan Renstra, RPJMD, SIPD, SDGS, dan LPPD di tahun 2022 dan tahun 2023:

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022				Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Capaian	Predikat	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
1.	Persentase tenaga kerja bersertifikat	%	0,75	0,05	6,67	Tidak Berhasil	0,81	0,7	86,42	Sangat Berhasil
2.	Persentase pengangguran yang ditangani	%	74,18	55,98	75,47	Sangat Berhasil	74,18	99,34	133,92	Sangat Berhasil
3.	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	35,42	0,77	2,17	Tidak Berhasil	36,51	0,8	2,19	Tidak Berhasil
4.	Nilai PMPRB	Angka	21,15	20,17	95,37	Sangat Berhasil	21,15	20,17	95,37	Sangat Berhasil

Tabel 3.2. Target dan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta berdasarkan Renstra

No	Capaian Indikator	Elemen Data RPJMD	Satuan	Tahun 2022				Tahun 2023			
				Target	Realisasi		Capaian (%)	Target	Realisasi		Capaian (%)
1.	Persentase perusahaan yang menerapkan Peraturan Perusahaan/PKB	Persentase Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perusahaan / PKB	%	36,00	17,83	17,83	49,53	36,00	16,49	17,83	45,81
2.	Persentase terpenuhinya kuota Program Transmigrasi	Persentase terpenuhinya kuota Program Transmigrasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,75	0,01	1,33	1,33	0,81	0,70	0,01	86,42
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,70	5,83	5,83	87,01	6,20	4,58	5,83	73,87
5.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	Kegiatan	100,00	9,00	45,00	45,00	100,00	8,00	42,11	42,11
		Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota	Kegiatan		20,00				19,00		
6.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Unit	34,32	25,00	0,77	2,25	35,42	23,00	0,52	1,47
		Jumlah perusahaan	Unit		3231,00				4421,00		
7.	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan	Orang	74,18	2136,00	39,05	52,64	74,18	1644,00	99,34	133,91
		Jumlah pencaker yang terdaftar	Orang		5470,00				1655,00		

Tabel 3.3. Target dan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta berdasarkan RPJMD

No	Capaian Indikator	Elemen Data SPID	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Tingkat pengangguran terbuka	Tingkat pengangguran terbuka	%	5.83	4.58
2.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	68.15	69.18
3.	Rasio penduduk yang bekerja	Rasio penduduk yang bekerja	-	0.94	0.95
4.	Rasio ketergantungan	Rasio ketergantungan	-	16.09	42.01
5.	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	-	94.17	95.43
6.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Orang	-	-
7.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Orang	-	-
8.	Keselamatan dan perlindungan	Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	-	-	-
9.	Kasus pemogokan kerja	Kasus pemogokan kerja	Kasus	-	-
10.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Orang	279	80
11.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat	Orang	95	0
12.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	158	377

No	Capaian Indikator	Elemen Data SPID	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
13.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Orang	2136	1644
14.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Orang	70824	36985
15.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Orang	6	16
16.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	-	-
17.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	0	0
18.	Angka partisipasi angkatan kerja	Angka partisipasi angkatan kerja	%	68.15	69.18
19.	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	%	68.15	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri: 21,22% dan proporsi pekerja bebas sebesar: 3,88%
20.	Persentase transmigran swakarsa	Persentase transmigran swakarsa	%	0	0
21.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	-	-
22.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	-	0	0
23.	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Orang	2055	1551

No	Capaian Indikator	Elemen Data SPID	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
24.	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Kondisi Kerja yang Layak	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Kondisi Kerja yang Layak	Pelaku Usaha	-	23
25.	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	Pelaku Usaha	-	-
26.	Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan non migas	Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan non migas	%	-	-
27.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	58.25	57.66
28.	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dan ditempatkan	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dan ditempatkan	Orang	47	116
29.	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat SMK3	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat SMK3	Pelaku Usaha	-	-
30.	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi	%	-	-
31.	Tenaga Kerja di Sektor Industri Non Migas (juta orang)	Tenaga Kerja di Sektor Industri Non Migas (juta orang)	Orang	-	278510
32.	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Industri Terhadap Total Pekerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Industri Terhadap Total Pekerja	%	-	-
33.	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Jamsos TK	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Jamsos TK	Pelaku Usaha	-	-
34.	Jumlah Perizinan dan Akreditasi LPK di daerah	Jumlah Perizinan dan Akreditasi LPK di daerah	Lembaga	32	33

No	Capaian Indikator	Elemen Data SPID	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
35.	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui IPK Daerah	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui IPK Daerah	Orang	2136	1644
36.	Jumlah Perusahaan yang telah Memiliki Struktur dan Skala Upah	Jumlah Perusahaan yang telah Memiliki Struktur dan Skala Upah	Pelaku Usaha	478	571
37.	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan konsultasi dan pengukuran produktivitas	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan konsultasi dan pengukuran produktivitas	Pelaku Usaha	27	4
38.	Jumlah Perusahaan yang mempekerjakan 10 orang atau lebih yang telah memiliki peraturan perusahaan	Jumlah Perusahaan yang mempekerjakan 10 orang atau lebih yang telah memiliki peraturan perusahaan	Pelaku Usaha	438	83
39.	Jumlah Perusahaan yang membuat Perjanjian Kerja Bersama	Jumlah Perusahaan yang membuat Perjanjian Kerja Bersama	Pelaku Usaha	138	21
40.	Jumlah Perusahaan yang mempekerjakan 50 orang atau lebih yang telah membentuk lembaga kerja sama bipartit	Jumlah Perusahaan yang mempekerjakan 50 orang atau lebih yang telah membentuk lembaga kerja sama bipartit	Pelaku Usaha	25	31
41.	Jumlah Lowongan Kerja Terdaftar	Jumlah Lowongan Kerja Terdaftar	Buah	6742	3237
42.	Jumlah Penempatan/ Pemenuhan Tenaga Kerja	Jumlah Penempatan/ Pemenuhan Tenaga Kerja	Unit	2136	1644
43.	Jumlah perusahaan yang mematuhi Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan melalui WLKP Online (Sisnaker)	Jumlah perusahaan yang mematuhi Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan melalui WLKP Online (Sisnaker)	-	2479	4421

Tabel 3.4. Target dan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta berdasarkan SIPD

No	Capaian Indikator	Elemen Data SDGS	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	-	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	%	45.32	82.9
2.	-	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	Orang	81	93
3.	-	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	%	8.52	27.53
4.	-	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan	%	Bukan Kewenangan	Bukan Kewenangan
5.	-	Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional	%/Orang	Bukan Kewenangan	Bukan Kewenangan
6.	-	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	%	Bukan Kewenangan	Bukan Kewenangan
7.	-	Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	%	Bukan Kewenangan	Bukan Kewenangan

Tabel 3.5. Target dan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta berdasarkan SDGs

No	Capaian Indikator	Elemen Data LPPD Output	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
				Nilai	Nilai Capaian Indikator	Nilai	Nilai Capaian Indikator
1.	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	-	-	-	1 dokumen Review RTK Makro	-
2.	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	Realisasi indikator dalam rencana tenaga kerja	%	-	-	-	-
		Target indikator dalam rencana tenaga kerja	%	-		-	
3.	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	Jumlah seluruh perusahaan yang melaporkan penyusunan RTK pada tahun pelaporan	Unit	0	0	25	25
4.	Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi klaster	Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNl atau okupasi pada tahun n	-	2	12.5	19	100
		Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n	-	16		19	
5.	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n	Orang	20	16.13	118	38.06
		Jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n	Orang	124		310	
6.	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah instruktur pada tahun n	Orang	124	5	310	10.36
		Jumlah peserta pelatihan pada tahun n	Orang	2479		2993	
7.	Persentase LPK yang terakreditasi	Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n	Lembaga	16	50	16	48.48
		Jumlah seluruh LPK pada tahun n	Lembaga	32		33	

No	Capaian Indikator	Elemen Data LPPD Output	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
				Nilai	Nilai Capaian Indikator	Nilai	Nilai Capaian Indikator
8.	Persentase LPK yang memiliki perizinan	Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n	Lembaga	2	100	33	100
		Jumlah LPK yang terdata pada tahun n	Lembaga	2		33	
9.	Jumlah penganggur yang dilatih	Jumlah penganggur yang dilatih	Orang	185	185	2993	2993
10.	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun n	Orang	299	100	2993	100
		Jumlah orang yang dilatih pada tahun n	Orang	299		2993	
11.	Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n	Orang	47	15.72	2015	67.32
		Jumlah lulusan pada tahun n	Orang	299		2993	
12.	Lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n	Orang	110	36.79	2993	100
		Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n	Orang	299		2993	
13.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	Σ CPMI dilatih	Orang	0	0	0	0
		Σ CPMI terdaftar	Orang	81		93	
14.	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	-	0	0	0	0

No	Capaian Indikator	Elemen Data LPPD Output	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
				Nilai	Nilai Capaian Indikator	Nilai	Nilai Capaian Indikator
15.	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n	Unit	27	0.84	4	0.09
		Jumlah perusahaan pada tahun n	Unit	3231		4421	
16.	Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan ekonomi - (pertumbuhan modal + pertumbuhan tenaga kerja)	%	-102.6	-102.6	6.25	6.25
17.	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun n	Unit	438	100	454	85.66
		Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih	Unit	438		530	
18.	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n	Unit	138	219.05	21	41.18
		Jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB	Unit	63		51	
19.	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	-	-	-	SP/SB di perusahaan yang tercatat: 59 SP/SB di luar perusahaan yang tercatat: 11 anggota SP/SB: 6.795 orang.	-
20.	Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah	Unit	478	82.99	571	120.21
		Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB)	Unit	576		475	

No	Capaian Indikator	Elemen Data LPPD Output	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
				Nilai	Nilai Capaian Indikator	Nilai	Nilai Capaian Indikator
21.	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan	Unit	3231	130.33	3312	74.92
		Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor	Unit	2479		4421	
22.	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Jumlah perusahaan yang berselisih	Unit	0	0	25	0.87
		Jumlah perusahaan pada tahun n	Unit	3231		2881	
23.	Jumlah mogok kerja	Jumlah mogok kerja	-	0	0	0	0
24.	Jumlah penutupan perusahaan	Jumlah penutupan perusahaan	Unit	6	6	3	3
25.	Jumlah perselisihan kepentingan	Jumlah perselisihan kepentingan	-	0	0	0	0
26.	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	-	0	0	0	0
27.	Jumlah perselisihan PHK	Jumlah perselisihan PHK	-	5	5	22	22
28.	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Orang	37	37	162	162
29.	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	-	4	4	29	29
30.	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	Lembaga	1	1	1	1
31.	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah perjanjian bersama	-	6	85.71	21	72.41
		Jumlah kasus perselisihan	Kasus	7		29	

No	Capaian Indikator	Elemen Data LPPD Output	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
				Nilai	Nilai Capaian Indikator	Nilai	Nilai Capaian Indikator
32.	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	-	6742	6742	3237	3237
33.	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kabupaten/kota	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	Orang	5470	5470	1655	1655
34.	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kabupaten/kota	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kabupaten/kota	-	61	61	67	67
35.	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	Orang	-	0	17	17
36.	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Orang	7	7	7	7
37.	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kabupaten/kota	Lembaga	0	0	33	33
38.	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota	-	27	27	160	160
39.	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Orang	2136	2136	1644	1644
40.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Σ CPMI/CTKI yang mendapatkan sosialisasi	Orang	81	100	93	100
		Σ CPMI/CTKI	Orang	81		93	
41.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Orang	81	81	93	93

No	Capaian Indikator	Elemen Data LPPD Output	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
				Nilai	Nilai Capaian Indikator	Nilai	Nilai Capaian Indikator
42.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepelangan	Σ fasilitasi PMI yang dipulangkan	Orang	-	-	-	-
		Σ PMI yang pulang	Orang	-		-	
43.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	Σ PMI/TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	Orang	-	-	-	-
		Σ PMI/TKI	Orang	81		93	
44.	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	Σ PMI/TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan	Orang	-	-	-	-
		Σ PMI/TKI purna dan keluarganya	Orang	-		-	
45.	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	Σ LTSA yang dibentuk	Lembaga	-	-	-	-
		Jumlah daerah kantong PMI/TKI	Kantong	-		-	
46.	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	Lokasi	-	-	-	-
47.	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Lokasi	-	-	-	-
48.	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	Lokasi	-	-	-	-

Tabel 3.6. Target dan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta berdasarkan LPPD Output

No	Capaian Indikator	Elemen Data LPPD Outcome	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
				Nilai	Nilai Capaian Indikator	Nilai	Nilai Capaian Indikator
1.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	Kegiatan	9	45	8	42.11
		Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota	Kegiatan	20		19	
2.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	Orang	32	0.05	2035	0.73
		Jumlah tenaga kerja keseluruhan	Orang	70824		278506	
3.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	Rupiah	38475.99	14.15	40620.31	14.59
		Jumlah tenaga kerja	Orang	271928		278506	
4.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Unit	25	0.77	23	0.52
		Jumlah perusahaan	Unit	3231		4421	
5.	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah pencari kerja (pencari kerja) yang ditempatkan	Unit	2136	39.05	1644	99.34
		Jumlah pencari kerja yang terdaftar	Unit	5470		1655	

Tabel 3.7. Target dan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta berdasarkan LPPD Outcome

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan/ atau Peningkatan/ Penurunan Kerja

B.1 Indikator Tenaga Kerja Bersertifikat

Secara umum, capaian indikator tenaga kerja bersertifikat pada tahun 2022 sebesar 6,67% dari target 0,75% tercapai 0,05% dengan predikat tidak berhasil. Hal ini disebabkan oleh data tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi hanya diambil dari data Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta, serta terbatasnya anggaran di Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta untuk menambah jumlah peserta maupun jenis pelatihan yang tersedia di Kota Surakarta.

Dilihat dari tabel 3.2 Target dan Capaian kinerja dinas tenaga kerja Kota Surakarta berdasarkan Renstra poin indikator Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat tahun 2023 sebesar 86,42% dari target 0,81% tercapai 0,70% dengan predikat berhasil. Salah satu faktor pendorong keberhasilan target pada tahun 2023 adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta melakukan pendataan secara intensif terhadap tenaga kerja bersertifikat kompetensi pada Perangkat Daerah dan Lembaga Latihan Kerja yang berada di wilayah Kota Surakarta serta bekerja sama dengan Balai Pelatihan untuk meningkatkan sertifikasi tenaga kerja. Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah tenaga kerja dengan sertifikat kompetensi di Kota Surakarta meningkat. Untuk pencapaian target indikator di tahun 2024, perlu dilakukan upaya antara lain:

1

Meningkatkan kompetensi pencari kerja dengan melakukan uji kompetensi dalam penyelenggaraan pelatihan.

2

Pendataan tenaga kerja bersertifikat kompetensi di Kota Surakarta.

Pada Tabel 3.3 Target dan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta berdasarkan RPJMD poin indikator Persentase Terpenuhinya Kuota Program Transmigrasi pada data RPJMD, capaian mencapai 100%. Hal ini dikarenakan Dinas Tenaga Kerja telah mengawasi, membantu, dan melatih para calon transmigran agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak.

Pada Tabel 3.3 Target dan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta berdasarkan RPJMD poin indikator Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi pada data RPJMD, terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 85,09%. Hal ini disebabkan oleh kerjasama Dinas Tenaga Kerja dengan lembaga sertifikasi pada tahun 2023 untuk melakukan uji kompetensi dalam penyelenggaraan pelatihan bagi calon pencari kerja.

Pada Tabel 3.4 Target dan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta berdasarkan SIPD pada indikator-indikator menunjukkan perubahan sebagai berikut:

- a. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan mengalami penurunan pada tahun 2022 peserta sebanyak 279 orang dan tahun 2023 peserta sebanyak 80 orang
- b. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat mengalami penurunan sebanyak 95 orang;
- c. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi meningkat sebanyak 219 orang;
- d. Besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan mengalami penurunan sebanyak 492 orang;
- e. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek mengalami penurunan sebanyak 3.899 orang;

- f. Jumlah tenaga kerja yang dilatih dan ditempatkan mengalami kenaikan sebanyak 69 orang;
- g. Tenaga kerja di sektor industri non-migas (juta orang) mengalami kenaikan sebanyak 278.510 orang;
- h. Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui IPK daerah mengalami penurunan sebanyak 492 orang.

Hal ini disebabkan pada tahun 2022 masih terbatasnya informasi terkait lowongan pekerjaan dan kegiatan pelatihan sertifikasi uji kompetensi, sedangkan pada tahun 2023, dinas telah bekerja sama dengan perusahaan untuk memberikan informasi lowongan pekerjaan serta pelatihan yang dibutuhkan.

Pada tabel 3.5 Target dan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta berdasarkan SDGs, indikator Proporsi Tenaga Kerja pada Sektor Industri Manufaktur pada tahun 2022 sebesar 8.52% dan tahun 2023 sebesar 27.53%. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya perusahaan yang berdiri di wilayah Kota Surakarta.

Pada Tabel 3.6. Target dan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta berdasarkan LPPD Output, berdasarkan sasaran strategis untuk meningkatkan keberdayaan, produktivitas, dan keunggulan masyarakat, terdapat kenaikan yang signifikan dari tahun 2022 ke 2023. Kenaikan tersebut bisa dilihat pada tabel 3.6 Target dan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta berdasarkan LPPD Output. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran pencari kerja untuk mengikuti uji kompetensi dalam penyelenggaraan pelatihan dan data tenaga kerja bersertifikat. Oleh karena itu, Dinas Tenaga Kerja akan bekerja sama dengan lembaga pelatihan sertifikasi untuk menciptakan tenaga kerja yang sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.

Pada Tabel 3.7. Target dan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta berdasarkan LPPD Outcome, capaian Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi mengalami kenaikan sebesar 0,68%, terkait dengan jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja keseluruhan. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya program uji kompetensi dan pelatihan bersertifikat yang telah dilaksanakan.

Pada tabel 3.7 Data LPPD Outcome, poin capaian Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada tahun 2022 sebesar 14.15% dan tahun 2023 sebesar 14.59%, sehingga mengalami kenaikan sebesar 0,44% berdasarkan PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) dan jumlah tenaga kerja.

B.2 Indikator Pengangguran Yang Ditangani

Secara umum, capaian indikator persentase pengangguran yang ditangani mencapai 55,72% dari target 74,18%, sehingga persentase capaian indikator sasaran pada tahun 2022 adalah 75,47%, dengan predikat berhasil. Meskipun demikian, Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta merasa belum puas dengan hasil tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain belum semua pencari kerja yang mendaftar memanfaatkan lowongan tenaga kerja yang tersedia, ketidaksesuaian antara kualifikasi yang diminta dan kualifikasi yang dimiliki oleh tenaga kerja, serta belum adanya pelaksanaan job fair.

Capaian kinerja tahun 2023 mencapai 133,92% dari target 74,18%, dengan persentase tercapai sebesar 99,34% dan predikat sangat berhasil. Dalam hal ini, Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta telah mengupayakan peningkatan kinerja untuk melebihi target sasaran indikator melalui:

- a. Meningkatkan pelayanan kepada pencari kerja baik *online* maupun *offline*.
- b. Bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan dalam informasi lowongan pekerjaan sehingga dapat diinformasikan kepada pencari kerja pada saat mencari Kartu AKI.
- c. Bekerja sama dengan Forum Bursa Kerja Khusus dalam informasi lowongan atau ada informasi penempatan terhadap alumninya.
- d. Pelaksanaan *job fair*.
- e. Pelatihan berbasis kompetensi kepada pencari kerja.
- f. Penyebarluasan informasi pasar kerja sampai ke tingkat Kelurahan.
- g. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat Kota Surakarta agar ikut serta dalam program transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Pada tabel 3.3 Target dan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta berdasarkan RPJMD poin Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka pada data RPJMD pada tahun 2022 sebesar 87.01% dan tahun 2023 sebesar 73.87% sehingga mengalami penurunan sebesar 13,14%. Penurunan ini disebabkan oleh kenyataan bahwa pada tahun 2022 masih banyak pencari kerja yang belum dapat memanfaatkan pelayanan yang disediakan oleh Dinas Tenaga Kerja, serta ketidaksesuaian antara persyaratan kualifikasi dan klasifikasi yang dimiliki oleh pencari kerja. Untuk mengatasi hal ini, pada tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja telah melaksanakan berbagai pelatihan dan memberikan informasi mengenai *job fair* yang diadakan di wilayah Kota Surakarta.

Pada tabel 3.3 Target dan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta berdasarkan RPJMD poin Indikator Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota pada data RPJMD pada tahun 2022 sebesar 52.64% dan tahun 2023 sebesar 133.91% mengalami kenaikan sebesar 81,27%. Kenaikan ini disebabkan oleh tenaga kerja yang telah mengikuti berbagai pelatihan dan memperoleh sertifikasi yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta.

Pada tabel 3.4 Target dan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta berdasarkan SIPD, poin indikator menunjukkan perubahan sebagai berikut:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2022 sebesar 5.83% dan tahun 2023 sebesar 4.58% sehingga mengalami penurunan sebesar 1,25%;
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Pada tahun 2022 sebesar 68.15% dan tahun 2023 sebesar 69.18% sehingga mengalami kenaikan sebesar 1,03%;
3. Rasio Penduduk yang Bekerja pada tahun 2022 sebesar 0.94 dan tahun 2023 sebesar 0.95 sehingga meningkat sebesar 0,01;
4. Rasio Ketergantungan pada tahun 2022 sebesar 16.09 dan tahun 2023 sebesar 42.01 mengalami kenaikan sebesar 25,92%;
5. Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas meningkat sebesar 1,26%;

6. Angka Partisipasi Angkatan Kerja mengalami kenaikan sebesar 1,03%;
7. Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri mengalami penurunan sebanyak 504 orang;
8. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan mengalami penurunan sebanyak 0,59%.

Hal ini disebabkan oleh peningkatan pelayanan oleh Dinas Tenaga Kerja yang mempermudah informasi lowongan pekerjaan bagi pencari kerja serta penyelenggaraan berbagai program pelatihan untuk para pencari kerja yang belum memiliki sertifikat kerja.

Pada Tabel 3.5. Target dan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta berdasarkan SDGS, indikator Jumlah Fasilitasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (TKLN) berdasarkan okupasi menunjukkan perbedaan pada tahun 2022 sebanyak 81 orang dan tahun 2023 sebanyak 93 orang, sehingga selisih sebanyak 12 orang yang berhasil mendapatkan pekerjaan di luar negeri sesuai dengan kompetensi atau keahlian yang dimiliki.

Pada Tabel 3.6. Target dan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta berdasarkan LPPD Output, berdasarkan sasaran strategis untuk meningkatkan keberdayaan, produktivitas, dan keunggulan masyarakat, terdapat beberapa peningkatan pada elemen data. Peningkatan ini disebabkan oleh belum berkembangnya sistem informasi terkait penyebarluasan lowongan kerja kepada masyarakat umum. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Tenaga Kerja melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di wilayah Kota Surakarta untuk memperoleh informasi lowongan kerja, meningkatkan pelayanan kepada pencari kerja baik secara online maupun offline, bekerja sama dengan forum bursa kerja khusus untuk mendapatkan informasi penempatan bagi para alumninya, serta menyelenggarakan job fair di wilayah Kota Surakarta.

Pada tabel 3.7 Target dan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta berdasarkan LPPD Outcome, poin capaian Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota mengalami peningkatan sebesar 60,29%, terkait dengan penempatan pencari kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

B.3 Indikator Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)

Untuk capaian indikator Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan), dapat diukur dengan melakukan pendataan terhadap perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Surakarta serta melakukan sosialisasi dan himbauan agar perusahaan-perusahaan tersebut menerapkan tata kelola kerja yang sesuai.

Capaian indikator dengan target 35,42% pada tahun 2022 masih jauh dari target, yaitu sebesar 0,77%, dengan persentase realisasi sebesar 2,17% dan predikat tidak berhasil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

- a. Tidak adanya fungsi pengawasan di Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta, di mana kewenangan pengawasan berada di tingkat provinsi, sehingga Dinas Tenaga Kerja tidak dapat menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada perusahaan yang tidak memenuhi kriteria tata kelola yang layak;
- b. Meskipun jumlah perusahaan yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta mengalami kenaikan signifikan (berdasarkan data Wajib Laporan Ketenagakerjaan), anggaran untuk sosialisasi penyusunan syarat tata kelola kerja yang layak sangat terbatas, sehingga tidak mampu menjangkau seluruh perusahaan.

Capaian kinerja tahun 2023 sebesar 2,19% dari target 36,51%, dengan persentase tercapai 0,80% dan predikat tidak berhasil. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Jumlah perusahaan yang ada di aplikasi Sidharta (SISTEM INFORMASI DATA HUBUNGAN INDUSTRIAL KOTA SURAKARTA) adalah sistem yang menyediakan data hubungan industrial di wilayah Kota Surakarta. Pada aplikasi tersebut menyediakan menu terkait perusahaan, kasus perselisihan, kasus pemutusan hubungan kerja, unjuk rasa dan demo.
- b. Persepsi perhitungan dalam pemasangan target di awal penyusunan Renstra dinilai terlalu tinggi.

Berikut adalah data jumlah perusahaan yang memenuhi semua kriteria tata kelola kerja yang layak, yaitu sebanyak 23 perusahaan. Sementara itu, jumlah seluruh perusahaan yang terdaftar di aplikasi Sidharta adalah sebanyak 2.881 perusahaan.

No	Kriteria Tata Kelola Kerja Yang Layak	Jumlah Perusahaan
1.	Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	475
2.	Membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit	42
3.	Mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	3312*
4.	Struktur Skala Upah	571
Jumlah Total		4400

*Data dari BPJS Ketenagakerjaan

Tabel 3.8. Jumlah Perusahaan yang Memenuhi Masing-masing Kriteria Tata Kelola Kerja yang Layak Kota Surakarta 2023

Jumlah total perusahaan yang memenuhi tata kelola kerja yang layak adalah sebanyak 1.088 perusahaan dan 3.312 orang. Data jumlah perusahaan dari BPJS Ketenagakerjaan berbeda dengan jumlah perusahaan yang terdaftar dalam aplikasi Sidharta karena tidak semua perusahaan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan mendaftarkan perusahaannya melalui aplikasi Sidharta atau di WLKP. Oleh karena itu, data perusahaan ini tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan capaian kinerja indikator.

Jika jumlah perusahaan yang terdaftar di BPJS dikecualikan, maka jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria tata kelola kerja yang layak, yaitu memiliki PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit, adalah sebanyak 1.088 perusahaan. Jika dibandingkan dengan seluruh perusahaan yang terdaftar di aplikasi Sidharta, yaitu sebanyak 2.881 perusahaan, capaian kinerja tahun 2023 adalah sebesar 37,76%. Dengan demikian, capaian kinerja tahun 2023 mencapai 103,42% dari target 36,51%, dengan predikat sangat berhasil.

Jika jumlah perusahaan yang terdaftar di BPJS dikecualikan, maka jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria tata kelola kerja yang layak, yaitu memiliki PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit, adalah sebanyak 1.088 perusahaan. Jika dibandingkan dengan seluruh perusahaan yang terdaftar di aplikasi Sidharta, yaitu sebanyak 2.881 perusahaan, capaian kinerja tahun 2023 adalah sebesar 37,76%. Dengan demikian, capaian kinerja tahun 2023 mencapai 103,42% dari target 36,51%, dengan predikat sangat berhasil.

Adapun capaian kinerja untuk mencapai target sasaran indikator ini pada tahun berikutnya antara lain melalui:

- a. Sosialisasi yang intensif dan bimbingan kepada perusahaan agar menerapkan tata kelola kerja yang layak di perusahaannya.
- b. Melakukan pendataan yang menyeluruh kepada perusahaan yang bertempat/berwilayah di Kota Surakarta.
- c. Melakukan monitoring ke perusahaan yang bertempat/berwilayah di Kota Surakarta untuk memantau penerapan tata kelola kerja yang layak di perusahaan.

Pada capaian dan indikator Persentase Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perusahaan/PKB dalam data RPJMD, terdapat perbedaan capaian tahun 2022 dan 2023 sebesar 3,72%. Surakarta yang pesat, sehingga Dinas Tenaga Kerja tidak dapat mendampingi atau melakukan sosialisasi terkait persyaratan PKB secara langsung.

Indikator Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan) dalam data RPJMD mengalami perbedaan capaian tahun 2022 dan 2023 sebanyak 0,78%. Hal ini disebabkan adanya kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk melatih perusahaan menerapkan tata kelola kerja yang baik di perusahaan, melakukan survei menyeluruh ke perusahaan yang berada di wilayah kota surakarta, dan melakukan pembinaan dan monitoring ke perusahaan agar tetap menjalankan tata kelola yang baik.

Pada Tabel 3.4. Target dan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta berdasarkan SIPD, indikator Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) mengalami kenaikan sebanyak 10 kasus, yang biasanya disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi antara pihak-pihak terkait. Indikator Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Kondisi Kerja yang Layak mengalami peningkatan sebanyak 23 pelaku usaha. Selain itu, Jumlah Perizinan dan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di daerah juga mengalami penambahan, dengan 1 lembaga baru terakreditasi.

Pada tabel 3.4 Target dan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta berdasarkan SIPD, poin indikator Jumlah Perusahaan yang telah Memiliki Struktur dan Skala Upah mengalami peningkatan sebanyak 96 pelaku usaha. Sementara itu, Jumlah Perusahaan yang mendapatkan konsultasi dan pengukuran produktivitas kini hanya mencakup 4 pelaku usaha. Poin indikator Jumlah Perusahaan yang mempekerjakan 10 orang atau lebih dan telah memiliki peraturan perusahaan mengalami penurunan sebanyak 355 pelaku usaha, dan poin indikator Jumlah Perusahaan yang membuat Perjanjian Kerja Bersama mengalami penurunan sebanyak 117 pelaku usaha. Di sisi lain, poin indikator Jumlah Perusahaan yang mempekerjakan 50 orang atau lebih dan telah membentuk lembaga kerja sama bipartit mengalami peningkatan sebanyak 6 pelaku usaha baru. Hal tersebut disebabkan ada salah satu *reward* kepada perusahaan yang dimana perusahaan sudah menjalankan tata kelola yang baik di wilayah perusahaan tiap tahun.

Pada Elemen data SDGs, indikator Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan mengalami kenaikan sebesar 37,58%, menunjukkan peningkatan jumlah perusahaan yang telah memahami jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja.

Pada Data LPPD *Output*, berdasarkan sasaran strategis untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan, berlandaskan Pancasila capaian yang diperoleh masih belum memadai. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya fungsi pembinaan di Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta, di mana kewenangan pengawasan berada di tingkat provinsi, sehingga Dinas Tenaga Kerja tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang tidak memenuhi kriteria tata kelola perusahaan yang layak. Selain itu, kenaikan jumlah perusahaan yang signifikan (berdasarkan data wajib lapor ketenagakerjaan) juga menjadi faktor penyebabnya. Untuk mencapai target di masa depan, diperlukan upaya yang meliputi sosialisasi yang intensif dan bimbingan kepada perusahaan agar menerapkan tata kelola kerja yang layak, pendataan menyeluruh terhadap perusahaan di Kota Surakarta, dan monitoring rutin untuk memastikan penerapan tata kelola kerja yang sesuai.

Pada tabel 3.7 Target dan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta berdasarkan LPPD *Outcome*, poin indikator capaian Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) mengalami penurunan sebesar 0,25%. Penurunan ini terkait dengan jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak serta jumlah kasus yang terjadi di perusahaan.

B.4 Indikator Nilai PMPRB

Capaian indikator Nilai PMPRB tahun 2023 tetap sama dengan hasil penilaian tahun 2022, yaitu sebesar 20,17. Dengan demikian, capaian kinerja tahun 2023 mencapai 91,68% dari target 22%, dengan predikat sangat berhasil. Pencapaian kinerja ini diukur berdasarkan indikator Nilai SAKIP, Nilai SKM, dan Nilai Maturitas SPIP.

Capaian indikator Nilai Maturitas Kelembagaan tahun 2023 mendapatkan hasil target 38 dengan realisasi 51 dan mendapatkan capaian 134,21 dengan predikat berhasil. Dan target akhir RPJMD adalah 39 dengan capaian 130,77. Pencapaian indikator ini juga diukur melalui beberapa program dari indikator Nilai PMPRB dan beberapa program lainnya seperti:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Untuk meningkatkan capaian di tahun mendatang, perlu dilakukan upaya pencapaian target kinerja dengan cara:

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melaksanakan SOP dan SP yang sudah ada.
- b. Melakukan surveillance ISO dalam pelayanan kepada masyarakat supaya segala permasalahan yang ada bisa terdeteksi sejak dini.
- c. Meningkatkan kualitas dan efektivitas perencanaan dan upaya bersama dalam mencapai target.
- d. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif.

Pada tabel 3.3 Target dan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta berdasarkan RPJMD Indikator Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana tenaga kerja pada tahun 2022 sebesar 45% dan tahun 2023 sebesar 42.11% sehingga mengalami penurunan sebesar 2,89%. Penurunan ini disebabkan oleh alih fungsi beberapa kegiatan/program tenaga kerja daerah yang dialihkan ke pelatihan dan kegiatan job fair, dengan tujuan untuk memaksimalkan pelayanan bagi pencari kerja di wilayah Kota Surakarta.

Pada Tabel 3.6. Target dan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta berdasarkan LPPD *Output*, berdasarkan sasaran strategis untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas perencanaan serta pencapaian kinerja perangkat daerah agar efektif dan efisien, tidak terjadi kenaikan maupun penurunan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena capaian nilai diukur dari indikator SAKIP, Nilai SKM, Nilai Maturitas Kelembagaan, dan Nilai Maturitas SPIP, yang menunjukkan stabilitas kinerja.

Pada Tabel 3.7. Target dan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta berdasarkan LPPD *Outcome*, persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana tenaga kerja pada tahun 2022 sebesar 45% dan tahun 2023 sebesar 42.11% mengalami penurunan sebesar 2,89%. Penurunan ini mencakup kegiatan keseluruhan yang mengacu pada Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) serta kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota.

BAB IV

DATA CAPAIAN KEGIATAN PER BIDANG DAN SEKRETARIAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS TENAGA KERJA KOTA SURAKARTA



57

Sekretariat



22

Bidang Perencanaan
dan Produktivitas
Tenaga Kerja



14

Bidang
Hubungan Industrial

PENCAPAIAN BIDANG PERENCANAAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA TAHUN 2023



69 Lembaga

Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus (BKK)



100 Orang

Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)



33 Lembaga

Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)



33 Orang

Tenaga Kerja Asing (TKA)



5 Perusahaan

Bimbingan Konsultasi pada Perusahaan



4 Kepala Keluarga

Melakukan Transmigrasi



337 Orang

Pelatihan Berbasis Kompetensi



1 Kegiatan

Job Fair tahun 2023



15 Jenis Pelatihan

Pelatihan Kerja



25 Perusahaan

Membuat Rencana Tenaga Kerja Mikro



80 Orang

Pelatihan Wira Usaha Baru



500 Orang

Membuat Rencana Tenaga Kerja Mikro

A. Data Capaian Per Bidang dan Sekretariat

Dalam rangka mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera secara berkeadilan dan inklusif, berikut adalah capaian kegiatan dan program kerja per bidang yang berhasil diraih oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta pada tahun 2023:

1. Sekretariat



a. Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta

Pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta tidak akan pernah meraih predikat “Berhasil” tanpa adanya sarana dan prasarana yang mendukung. Di tahun 2023, Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta memiliki 127 jenis sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja. Berikut adalah daftar sarana dan prasarana penunjang kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta di tahun 2023:

No	Nama Barang	Jumlah
1.	Meja kerja Pejabat Eselon II	3
2.	Distilling Aparatur	4
3.	Meja Tambahan	2
4.	Radio	1
5.	Amplifier	1
6.	<i>Mic/Wireless Mic</i>	1
7.	<i>Horizontal Planar Motion Mechanism</i>	2
8.	<i>Hub</i>	1
9.	Lemari Besi/Metal	15
10.	Mesin Absensi	1
11.	Meja Rapat	12
12.	<i>AC Window</i>	29
13.	Pesawat Telephone	3
14.	Tensimeter	1
15.	Printer	1
16.	Papan Visual/Papan Nama	3
17.	Papan Nama Instansi	2
18.	Televisi	9
19.	<i>Camera Film</i>	6
20.	Peralatan Personal Komputer Lainnya	2

No	Nama Barang	Jumlah
21.	Peralatan Jaringan Lainnya	2
22.	Lemari Kaca	6
23.	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2
24.	Papan Pengumuman	2
25.	Notebook	13
26.	Monitor	1
27.	Station Wagon	1
28.	Alat Ukur Lain-lain Lainnya (dst)	9
29.	Mesin Ketik Listrik Portable (11-13 inc)	2
30.	Camera Video	2
31.	Alat Pemadam Kebakaran	3
32.	Camera Elektronik	3
33.	Layar Film/Projektor	2
34.	PC Unit	24
35.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	63
36.	Sepeda Motor	15
37.	Rak Besi	2
38.	Filling Cabinet Besi	26
39.	Slide Projector	2
40.	Peralatan Umum Lainnya	1

No	Nama Barang	Jumlah
41.	Kursi Tamu	3
42.	<i>Rice Cooker</i> (alat dapur)	2
43.	<i>Sound System</i>	4
44.	Dekortikasi	1
45.	Laptop	29
46.	Meja Kerja Besi/Metal	13
47.	<i>Tustel</i>	1
48.	<i>Gordyn/Kray</i>	1
49.	<i>Camera Electronic</i>	2
50.	Server	1
51.	Meja Komputer	4
52.	Lemari Kayu	10
53.	<i>LCD Projector/Infocus</i>	2
54.	Kursi Rapat	121
55.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2
56.	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	1
57.	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	1
58.	Meja Kerja	8
59.	Meja Kerja Kayu	1
60.	Lemari Es	2

No	Nama Barang	Jumlah
61.	Meja Rapat Pejabat Lainnya	3
62.	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	21
63.	Alat komunikasi telephone lainnya	2
64.	Kursi Putar	23
65.	Bangku Tunggu	6
66.	Lemari Kaca	1
67.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1
68.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	13
69.	Lemari Arsip Pejabat lainnya	4
70.	<i>Wireless Amplifier</i>	1
71.	<i>Infrared Thermometer</i>	1
72.	Alat Penghancur Kertas	1
73.	<i>Portable Air Conditioner</i> (alat pendingin)	2
74.	Meja tamu biasa	3
75.	Meja Operator	2
76.	Kursi Rapat Pejabat Lainnya	13
77.	<i>Audio Mixing Console</i>	1
78.	Lampu <i>Blitz</i> Kamera	2
79.	LCD Monitor	1
80.	Genset	1

No	Nama Barang	Jumlah
81.	Kamera Digital	1
82.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5
83.	Router	1
84.	Air Conditioning (AC)	7
85.	Sepeda	2
86.	CCTV – Camera Control Television System	1
87.	Meja Marmer	1
88.	AC Split	4
89.	Kipas Angin	13
90.	Mic Conference	1
91.	Dispenser	1
92.	HandyCam	1
93.	Microphone/ Wireless Mic	3
94.	Sice	1
95.	Meja ½ Biro	32
96.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	4
97.	Mesin Ketik Manual Standard (14–16)	8
98.	Facsimile	1
99.	Mesin Ketik Manual Standard (11–13)	1
100.	Tiang Bendera	1

No	Nama Barang	Jumlah
101.	Mimbar Podium	1
102.	Sofa	1
103.	Bangku Injak	3
104.	Kursi Lipat	50
105.	Timbangan Barang	1
106.	Stethoscope (Alat Kedokteran Nuklir)	1
107.	Intercom Unit	11
108.	Uninterruptible Power Supply	5
109.	Kursi Besi/ Metal	20
110.	Alat Kantor Lainnya	2
111.	Kompor Gas	1
112.	Tabung Gas	1
113.	Alat Pengolahan lainnya	10
114.	Microphone Cable	7
115.	Eksternal/ Portable Hard Disk	4
116.	Router	4
117.	Mobile Modem GSM/CDMA	2
118.	Microphone	1
119.	Tangga Alumunium	2
120.	Lighting Stand Tripod	2

No	Nama Barang	Jumlah
121.	<i>Camera Film</i>	4
122.	Lampu Blitz Kamera	3
123.	Alat Studio Lainnya	5
124.	<i>Tripod</i>	2
125.	<i>Infrared Thermometer</i>	5
126.	<i>Background</i>	3
127.	<i>Hard Disk</i>	5

Tabel 4.1. Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta

b. Standar Operasional Prosedur Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang berisikan prosedur operasional yang harus diikuti oleh anggota organisasi untuk mencapai efisiensi, kualitas, dan keseragaman kinerja. SOP berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa tugas dan proses dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Guna memudahkan dan memastikan kegiatan dan program kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan, Dinas Tenaga Kerja menyusun SOP berjumlah 93 jenis dari tiap bidang dan sekretariat. Berikut adalah Standar Operasional Prosedur Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta di tahun 2023:

Bidang	Jumlah
Sekretariat	57
Bidang Perencanaan dan Produktivitas Tenaga Kerja	22
Bidang Hubungan Industrial	14
Total	93

Tabel 4.2. Standar Operasional Prosedur Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta

C. Standar Pelayanan Publik Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta

Dinas Tenaga Kerja memiliki 27 jenis layanan yang ditetapkan dalam SK Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta No 1142/2023 tentang Standar Pelayanan. Tujuan dibuatnya standar pelayanan ini adalah untuk meningkatkan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta selalu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Berikut adalah jenis Standar Pelayanan Publik Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta di tahun 2023:

No	Jenis Layanan
1.	Pelayanan Penerbitan Kartu Pencari Kerja (AK-1)
2.	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
3.	Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Disabilitas
4.	Publikasi Informasi Lowongan Pekerjaan
5.	Fasilitasi Perekrutan Calon Tenaga Kerja
6.	<i>Job Matching</i>
7.	Penerbitan Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus (BKK)
8.	Pelaksanaan Pameran Bursa Kerja / <i>Job Fair</i>
9.	Pelatihan Wirausaha Baru
10.	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna
11.	Verifikasi Pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
12.	Verifikasi Perjanjian Calon Pekerja Migran Indonesia
13.	Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
14.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)
15.	Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi
16.	Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Produktivitas
17.	Pelaksanaan Pengukuran Produktivitas
18.	Pendaftaran Calon Transmigran
19.	<i>Pembekalan Calon Transmigran</i>
20.	Pengesahan Peraturan Perusahaan

No	Jenis Layanan
21.	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
22.	Penyelesaian Perselisihan
23.	Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit
24.	Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
25.	Konsultasi Hubungan Industrial
26.	Pengaduan Hubungan Industrial
27.	Usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota

Tabel 4.3. Standar Pelayanan Publik Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta

2. Bidang Perencanaan dan Produktivitas Tenaga Kerja



Bidang Perencanaan dan Produktivitas Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja (PPTK) adalah bidang yang bertanggung jawab atas perencanaan strategis dan peningkatan produktivitas tenaga kerja di wilayah Kota Surakarta. Bidang PPTK berfungsi untuk mencakup penyelenggaraan kebijakan teknis, pemerintahan, monitoring, evaluasi, serta koordinasi terkait pelayanan antar kerja, informasi pasar kerja, perlindungan pekerja migran, perizinan tenaga kerja asing, rencana tenaga kerja, pelatihan, pembinaan lembaga pelatihan kerja, dan pengukuran produktivitas.

Dengan memenuhi fungsi tersebut, berikut adalah gambaran umum dari Ketenagakerjaan di Kota Surakarta pada tahun 2023:

Profil Ketenagakerjaan		
Jenis Data	Hasil	Keterangan
Penduduk Usia Kerja (PUK)	421.909 orang	
Angkatan Kerja (AK)	291.864 orang	
Bekerja	278.506 orang	
Pengangguran	13.358 orang	
Bukan Angkatan Kerja	130.045 orang	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2022	5.83 %	Tingkat Pengangguran Terbuka turun sebesar 1.25 %
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2023	4.58 %	
Sumber: Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2023		

Tabel 4.4. Gambaran Umum Ketenagakerjaan Kota Surakarta tahun 2023

Tujuan dari Bidang Perencanaan dan Produktivitas Tenaga Kerja adalah untuk meningkatkan produktivitas di perusahaan, baik dari segi kualitas dan kompetensi tenaga kerja, maupun dari hasil produksi perusahaan tersebut, sehingga mampu bersaing secara efektif di pasar dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi wilayah.

Dalam upaya memenuhi tujuan Bidang PPTK, berikut adalah pencapaian yang telah diraih selama tahun 2023:

Nama Kegiatan	Hasil	Keterangan
Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus (BKK)	Total: 69 Lembaga/ Institusi/SMK	<ul style="list-style-type: none"> • SMK: 48 Sekolah • Pendidikan Tinggi: 14 Institusi • Lembaga Pelatihan Kerja Swasta: 6 Lembaga • Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah: 1 Lembaga
Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Total: 33 Lembaga	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Terakreditasi: 17 Lembaga • Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (<i>Sending Organization</i>): 4 Lembaga *Contoh SO: Pemagangan ke Jepang. • Lembaga Pelatihan Kerja <i>Online Single Submission</i>: 12 Lembaga
Bimbingan Konsultasi pada Perusahaan	5 Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Sangkar Burung Eank Solo • PT Lintang Kejora • Batik Mahkota • PT Tiga Serangkai • Batik Godongkoe

Nama Kegiatan	Hasil	Keterangan
Pelatihan Berbasis Kompetensi	337 orang	
Pelatihan	15 Jenis Pelatihan	Barista, Make Up Artist, Barbershop, Beautician Therapist, Service Motor, Service AC, Content Creator, Video Editor, Hidroponik, Pembuatan Hantaran, Sablon, Tour Guide, Pastry, Hair Stylist, Fusion Food
Pelatihan Wira Usaha Baru	80 orang	Barista, Barbershop, MUA, Manajemen Reseller dan Dropshipper
Verifikasi Dokumen CPMI	100 orang	Calon Pekerja Migran Indonesia
Tenaga Kerja Asing (TKA)	33 orang	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi Kerja di Surakarta: 9 orang • Lokasi Kerja di Surakarta dan sekitarnya: 14 orang
Transmigrasi	4 Kepala Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> • Luwu Timur Mahalona, Sulawesi Selatan: 3 KK • Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan: 1 KK
Job Fair	1 Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Lowongan Pekerjaan: 3500 lowongan • Perusahaan: 42 Perusahaan
Rencana Tenaga Kerja Mikro	25 Perusahaan	Membuat Rencana Tenaga Kerja Mikro
Rencana Tenaga Kerja Mikro	500 Orang	Penyuluhan Bimbingan Jabatan ke SMK dengan jumlah APBD Sekolah untuk 500 orang

Tabel 4.5. Pencapaian Bidang Perencanaan dan Produktivitas Tenaga Kerja tahun 2023

Bidang Perencanaan dan Produktivitas Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja memiliki peran penting dalam penempatan tenaga kerja di suatu wilayah yang dibagi berdasarkan jenis penempatan AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah), dan AKAN (Antar Kerja Antar Negara). Bidang PPTK berperan dalam memastikan bahwa tenaga kerja ditempatkan di lokasi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka dan pasar kerja, baik itu dalam konteks lokal, antar daerah, atau internasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, berikut adalah penempatan tenaga kerja di Kota Surakarta pada tahun 2023:

Bulan	Jenis Penempatan								
	AKL			AKAD			AKAN		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Januari	5	52	57	-	-	-	3	3	6
Februari	17	69	86	-	-	-	2	2	4
Maret	11	68	79	-	-	-	4	-	4
April	6	36	42	-	-	-	1	1	2
Mei	20	41	61	-	-	-	3	6	9
Juni	67	63	130	-	-	-	8	5	13
Juli	29	51	80	-	-	-	3	12	15
Agustus	-	1	1	-	-	-	3	7	10
September	441	53	494	-	-	-	1	4	5
Oktober	117	11	128	-	-	-	2	8	10
November	50	8	58	-	-	-	1	6	7
Desember	262	73	335	-	-	-	2	6	8
Total	1,025	526	1,551	-	-	-	33	60	93

Tabel 4.6. Penempatan Tenaga Kerja di Kota Surakarta tahun 2023

Bidang Perencanaan dan Produktivitas Tenaga Kerja memiliki peran penting dalam mendukung perusahaan yang memberi kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Bidang PPTK bertugas dalam menyelenggarakan kebijakan daerah terkait perencanaan, penempatan, produktivitas tenaga kerja dan transmigrasi yang setara bagi semua individu.

Berkaitan dengan hal tersebut, berikut perusahaan yang memberikan peluang kerja untuk penyandang disabilitas di Kota Surakarta pada tahun 2023:

No	Nama Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas	
		L	P
1.	PT Sari Warna Asli	8	20
2.	RS Brayat Minulyo	2	2
3.	RS Tri Harsi	1	2
4.	Iskandar Tex	1	-
5.	PT Bintang Lima Aneka Warna	1	-
6.	Nakamura	1	1
7.	RS dr. Oen	1	-
8.	PDAM	6	-
9.	PT Solo Murni	3	1
10.	RS PKU Muhammadiyah Surakarta	5	5
Jumlah		29	31

Tabel 4.7. Perusahaan yang Memberikan Peluang Kerja untuk Kaum Disabilitas di Kota Surakarta tahun 2023

3. Bidang Hubungan Industrial



Bidang Hubungan Industrial dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta adalah bidang yang bertugas untuk menyelenggarakan kebijakan daerah terkait bina perusahaan dan pencegahan, penyelesaian perselisihan, dan kesejahteraan pekerja di Kota Surakarta. Tugas dan fungsi dari Bidang Hubungan Industrial adalah untuk mengelola kebijakan, pemerintahan, monitoring, dan koordinasi terkait pengesahan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, serta penyelesaian perselisihan, mogok kerja, dan penutupan perusahaan. Bidang Hubungan Industrial berperan penting dalam memastikan bahwa hubungan antara pekerja dan pengusaha berjalan dengan baik dan adil, serta meminimalisir konflik yang dapat mengganggu produktivitas dan kesejahteraan kedua belah pihak.

Dalam program Bidang Hubungan Industrial, salah satu sasarannya adalah meningkatnya jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perusahaan sesuai dengan perjanjian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta. Jumlah perusahaan yang tersebar di wilayah Kota Surakarta mencapai 2.881 perusahaan. Berikut adalah rincian persebaran perusahaan di masing-masing kecamatan di Kota Surakarta:

Kecamatan	Jumlah Perusahaan
Laweyan	726
Jebres	608
Banjarsari	906
Serengan	318
Pasar Kliwon	323
Total	2.881

Tabel 4.8. Jumlah Perusahaan di Kota Surakarta Tahun 2023

Dalam upaya memenuhi tujuan Bidang Hubungan Industrial, berikut adalah pencapaian yang telah diraih selama tahun 2023 oleh Bidang Hubungan Industrial:

Jenis Data	Hasil
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)	121 Perusahaan
Perusahaan	2.881 Perusahaan
Tenaga Kerja	44.601 Tenaga Kerja <ul style="list-style-type: none"> • Laki-laki: 25.086 Orang • Perempuan: 19.515 Orang
Kepesertaan BPJS Naker	130.262 Tenaga Kerja
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	164 Orang
Serikat Pekerja	<ul style="list-style-type: none"> • 70 Serikat Pekerja • 59 SP di dalam Perusahaan • 11 SP di luar Perusahaan • 6.795 Anggota SP
Konsultasi Hubungan Industrial	240 Konsultasi
Aduan Hubungan Industrial	<ul style="list-style-type: none"> • 98 Aduan, terdiri dari 27 ulas dan 71 form aduan HI • 1 aduan diteruskan ke Disnaker Boyolali
Perselisihan Hubungan Industrial	<ul style="list-style-type: none"> • 29 Perselisihan dari 62 Pekerja: 41 laki-laki dan 21 perempuan • Hasil Penyelesaian: 18 PB dan 11 Anjuran • Jenis Perselisihan: 22 PHK dan 7 Hak
Struktur dan Skala Upah	510 Perusahaan
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	69 PKWT dari 35 Perusahaan

Jenis Data	Hasil
Penutupan Perusahaan	5 Perusahaan
Lembaga Kerja Sama Tripartit	1 Lembaga
Lembaga Kerja Sama Bipartit	32 Lembaga
Peraturan Perusahaan (PP)	<ul style="list-style-type: none"> • 460 PP terdiri dari 459 PP Swasta dan 1 PP Badan Usaha Milik Daerah (Bank Solo) • 240 Perusahaan yang sudah mengesahkan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	16 PKB

Tabel 4.9. Pencapaian Bidang Hubungan Industrial Tahun 2023

Bidang Hubungan Industrial juga memiliki peran penting dalam mengurangi aduan dan perselisihan dengan memastikan bahwa tenaga kerja dipersiapkan dengan baik dan sektor-sektor industri memiliki sistem yang efektif untuk menangani masalah ketenagakerjaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, berikut adalah sektor-sektor dengan jumlah aduan dan perselisihan terbanyak yang ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta selama tahun 2023:

Sektor	Jenis Sektor
Sektor 1	Makanan dan Minuman ● 15 Kasus dari 15 Perusahaan
Sektor 2	Perusahaan Jasa (Ekspedisi, Kecantikan, Outsourcing, Customer Service, dan Call Center) ● 13 Kasus dari 7 Perusahaan
Sektor 3	Perdagangan ● 9 Kasus dari 9 Perusahaan

Tabel 4.10. Sektor dengan Jumlah Aduan Terbanyak di Tahun 2023

Sektor	Jenis Sektor
Sektor 1	Perdagangan ● 7 Kasus dari 7 Perusahaan
Sektor 2	Perusahaan Jasa (Kecantikan, Outsourcing, Jaringan Komunikasi) ● 6 Kasus dari 6 Perusahaan
Sektor 3	Pariwisata (Hotel dan Wisata) ● 4 Kasus dari 4 Perusahaan

Tabel 4.11. Sektor dengan Jumlah Perselisihan Terbanyak di Tahun 2023

B. Dokumentasi Kegiatan Program Kerja

Berikut ini adalah dokumentasi dari setiap program kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta dalam meningkatkan kualitas, penempatan, dan perlindungan tenaga kerja:



Gambar 4.1. Capacity Building bersama Serikat Pekerja/Serikat Buruh



Gambar 4.2. Kaji Banding Kelembagaan



Gambar 4.3. Uji Kompetensi Hubungan Industrial



Gambar 4.4. Posko Tunjangan Hari Raya 2023



Gambar 4.5. Lomba Olahraga LKS Tripartit



Gambar 4.6. Sidang Dewan Pengumpulan



Gambar 4.7 Sidang Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial



Gambar 4.8. Senam Bersama (Puncak May Day Tahun 2023)



Gambar 4.9. Bimbingan Teknis Struktur dan Skala Upah



Gambar 4.10. Monitoring Tunjangan Hari Raya 2023



Gambar 4.11. Forum Konsultasi Publik: Peninjauan ulang Standar Pelayanan



Gambar 4.12. Diskusi Kelompok Terbatas tentang Rencana Kerja



Gambar 4.13. Penerimaan Piagam Penghargaan: Capaian Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka terbaik Kabupaten/Kota se Jawa Tengah 2022



Gambar 4.14. Penerimaan Piagam Penghargaan: Capaian Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka terbaik Kabupaten/Kota se Jawa Tengah 2022



Gambar 4.15. Review Rencana Strategis



Gambar 4.16. Diskusi Kelompok Terbatas tentang Rencana Kerja



Gambar 4.17. Diskusi Kelompok Terbatas tentang Rencana Kerja



Gambar 4.18. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Kepegawaian



Gambar 4.19. Diskusi Kelompok Terbatas tentang Rencana Kerja



Gambar 4.20. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian dan Manajemen Resiko



Gambar 4.21. Verifikasi Perjanjian Penempatan CPMI



Gambar 4.22. Rencana Tenaga Kerja Makro



Gambar 4.23. Pelatihan Kompetensi



Gambar 4.24. Job Fair Solo Career Expo



Gambar 4.25. Bimbingan Konsultasi Perusahaan



Gambar 4.26. Pengukuran Produktivitas



Gambar 4.27. LPK Verifikasi (Perizinan OSS)



Gambar 4.28. Bimbingan Teknis Bursa Kerja Khusus (BKK)



Gambar 4.29. Transmigrasi



Gambar 4.30. Pelayanan AK 1

BAB V

PENUTUP



Berdasarkan tujuan penulisan Buku Profil Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta tahun 2024, buku ini telah disusun dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sampai tahun 2023, Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta dalam mewujudkan tujuannya, telah memiliki sumber daya manusia berjumlah 44 orang dan sarana prasarana yang berkualitas baik berjumlah 127 jenis.
2. Dalam rangka mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera secara berkeadilan dan inklusif, capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta mencapai rata-rata 105.2% dengan predikat "Sangat Berhasil" di tahun 2023 berdasarkan elemen indikator persentase dari Renstra.
3. Dari indikator "Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak" dalam Renstra tahun 2023, capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta mencapai predikat "Tidak Berhasil", disebabkan oleh faktor berikut:

- a. Persepsi perhitungan dalam pemasangan target di awal penyusunan Renstra dinilai terlalu tinggi
- b. Tidak ada fungsi pembinaan di Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta dan adapun pengawasan ada di tingkat provinsi sehingga Dinas Tenaga Kerja tidak dapat memberikan peringatan kepada perusahaan yang tidak memenuhi kriteria tata kelola perusahaan yang layak.
- c. Terbatasnya anggaran untuk melakukan sosialisasi terkait penyusunan syarat tata kelola kerja yang layak.
- d. Berkembangnya jumlah perusahaan yang naik secara signifikan tiap tahunnya.

Adapun untuk mencapai target sasaran indikator ini pada tahun berikutnya antara lain melalui:

- a. Menghitung ulang terkait perhitungan Renstra terkait indikator persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak untuk disesuaikan pada penyusunan Renstra berikutnya.
- b. Melakukan sosialisasi dan pembinaan perusahaan yang berada di wilayah Kota Surakarta agar menerapkan tata kelola yang baik.
- c. Memberikan reward kepada perusahaan yang sudah menerapkan tata kelola yang layak di perusahaannya.

Dengan kesimpulan tersebut, buku ini diharapkan dapat digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan informasi terkait ketenagakerjaan secara umum.

Surakarta, Juli 2024

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta



Widyastuti Pratiwiningsih, S.I.P., M.M.

NIP. 19721028 199203 2 007



LAMPIRAN

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2022			Presentase Capaian (%)
			Target Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja	Satuan	
1.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja	100	100	%	100,00
2.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja	100	100	%	100,00
3.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Penyusunan Dokumen Tenaga Kerja Makro	1	1	Dokumen	100,00
4.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Penyusunan Dokumen Tenaga Kerja Mikro	50	20	Perusahaan	40,00
			25	20	Dokumen	80,00
5.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100	100	%	100,00
6.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (PMDN 86/2017)	100	100	%	100,00
7.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja/ penganggur yang dilatih (PMDN 18/2020)	50	158	Orang	316,00
8.	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah MoU yang dihasilkan dengan Lembaga Pelatihan Kerja	5	2	MoU	40,00
9.	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten / Kota	Jumlah peralatan dan bahan baku yang disediakan	5	158	Paket	3160,00
10.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang terakreditasi (PMDN 86/2017)	6,7	0	%	0,00
11.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPK yang dibina	30	30	Lembaga	100,00
12.	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase LPKS yang memiliki izin	100	100	%	100,00
13.	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Pelaksanaan pelayanan perizinan LPK	12	Tidak ada data	Bulan	Tidak terhitung

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2022			Presentase Capaian (%)
			Target Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja	Satuan	
14.	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Prosentase Perusahaan kecil yang melakukan konsultasi produktivitas	100	100	%	100,00
15.	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah pelayanan konsultasi perusahaan kecil	2	4	Perusahaan	100,00
16.	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	100	100	%	100,00
17.	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Data produktivitas TK	1	3	Dokumen	300,00
18.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja / Pencari Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam wilayah kota	74,18	29,93	%	40,35
19.	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja / Pencari Kerja yang ditempatkan Dalam Negeri	50	27,1	%	54,20
		Persentase calon PMI yang mendapatkan rekomendasi paspor	100	0	%	0,00
20.	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja (PMDN 18/2017)	9	7	Orang	77,78
21.	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah bulan pelaksanaan pelayanan antar kerja	12	12	Bulan	100,00
22.	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah siswa yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	400	100	Siswa	25,00
23.	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu Kabupaten/Kota	20	11	Orang	55,00
24.	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap pada kegiatan perluasan kerja	110	96	Orang	87,77
25.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah media penyaluran informasi pasar kerja yang dikelola	4	4	Media/ Tahun	100,00
26.	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah aplikasi IPK yang terpelihara	12	0	Bulan	0,00

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2022			Presentase Capaian (%)
			Target Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja	Satuan	
27.	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah informasi pasar kerja yang terdata secara online	1	1	Dokumen	100,00
28.	Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah job fair dan bursa kerja yang terlaksana	1	0	Kali	0,00
29.	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Calon PMI dan Eks PMI yang dibina	100	0	%	0,00
30.	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia / Pekerja Migran Indonesia	Jumlah calon PMI yang diberikan pelatihan	10	0	Orang	0,00
31.	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang diberdayakan	20	15	Orang	75,00
32.	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang mempekerjakan TKA yang mendapatkan Sosialisasi	100	100	%	100,00
33.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang mempekerjakan TKA yang mendapatkan sosialisasi	20	20	Perusahaan	100,00
34.	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Prosentase terpenuhinya kuota program transmigrasi	100	100	%	100,00
35.	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 daerah Kabupaten/Kota	Prosentase terpenuhinya kuota program transmigrasi	100	1	%	1,00
36.	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 daerah Kabupaten/Kota	MoU yang ditandatangani (KSAD)	1	1	Dokumen	100,00
37.	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas transmigran yang ditempatkan	1	1	Kali	100,00
			5	1	KK	20,00
38.	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah masyarakat kota Surakarta yang mendapatkan penyuluhan	50	0	Kali	0,00
39.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perusahaan / PKB	36	17,18	%	47,72

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2022			Presentase Capaian (%)
			Target Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja	Satuan	
40.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) (PMDN 18/2017)	5	17,18	%	343,60
41.	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan (PP) (PMDN 18/2017)	2	288	Perusahaan	14400,00
42.	Pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan	Jumlah perusahaan yang telah disahkan didaftarkan perjanjian kerja bersama (PKB) (PMDN 18/2017)	1	138	Perusahaan	13800,00
43.	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah perusahaan yang memiliki sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	2	502	Perusahaan	25100,00
44.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus sengketa pengusaha yang terselesaikan (PMDN 18/2017)	88,57	100	%	112,91
45.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dibina terkait permasalahan ketenagakerjaan	50,00	1234,00	Perusahaan	2468,00
46.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial	35	7	Kasus	20,00
47.	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan (PMDN 18/2017)	1	1	Dokumen	100,00
48.	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	1	1	Lembaga	100,00

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2022			Presentase Capaian (%)
			Target Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja	Satuan	
49.	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	20	502	Perusahaan	2510,00
		Jumlah perusahaan yang telah menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja	30	26	Perusahaan	86,67
		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2986	187606	Orang	6282,85
50.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	80	65,55	Nilai	81,94
		Nilai SKM	85	87,18	Angka	102,56
		Nilai Maturitas Kelembagaan	37	45	Level	121,62
		Nilai Maturitas SPIP	2,6	1,83	Nilai	70,38
51.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja berkualitas	100	100	%	100,00
52.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	Dokumen	100,00
53.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA Perangkat Daerah	1	1	Dokumen	100,00
54.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah	1	1	Dokumen	100,00
55.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DPA Perangkat Daerah	1	1	Dokumen	100,00
56.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DPA Perubahan Perangkat Daerah	1	1	Dokumen	100,00
57.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	4	4	Dokumen	100,00
58.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	12	Bulan	100,00
59.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100	100	%	100,00
60.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	12	12	Bulan	100,00

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2022			Presentase Capaian (%)
			Target Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja	Satuan	
61.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran	3	4	Laporan	133,33
62.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	%	100,00
63.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Pembelian Alat Listrik guna penerangan bangunan kantor	12	12	Bulan	100,00
64.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1	Kegiatan/ Paket	100,00
65.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	1	Paket	100,00
66.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak	12	12	Bulan	100,00
67.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembelian Buku Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	1	Kegiatan/ Paket	100,00
68.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	Bulan	100,00
69.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100	100	%	100,00
70.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembelian Kendaraan Perorangan Dinas	Tidak tercantum dalam renstra	2	Unit	Tidak terhitung
71.	Pengadaan Mebel	Pembelian meubelair	1	1	Kegiatan/ Paket	100,00
72.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembelian materai dan pengiriman surat	12	12	Bulan	100,00
73.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	Bulan	100,00
74.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tidak tercantum dalam renstra	Tidak tercantum dalam renstra	12	Tidak tercantum dalam renstra	Tidak terhitung

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2022			Presentase Capaian (%)
			Target Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja	Satuan	
75.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Tidak tercantum dalam renstra	1	Laporan	Tidak terhitung
76.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	100	100	%	100,00
77.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tidak tercantum dalam renstra	17	Unit	Tidak terhitung
78.	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Meubelair Kantor	12	12	Bulan	100,00
79.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	12	12	Bulan	100,00
80.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Tidak tercantum dalam renstra	200	Unit	Tidak terhitung
81.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Prosentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tidak tercantum dalam renstra	100	%	Tidak terhitung
82.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tidak tercantum dalam renstra	1	Dokumen	Tidak terhitung
83.	Koordinasi dan Sinkronisasi, Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengolahan statistik sektoral	Tidak tercantum dalam renstra	1	Laporan	Tidak terhitung
84.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase terselesaikannya dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Tidak tercantum dalam renstra	100	%	Tidak terhitung
85.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan	Tidak tercantum dalam renstra	1	Dokumen	Tidak terhitung

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2022			Presentase Capaian (%)
			Target Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja	Satuan	
86.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan	Tidak tercantum dalam renstra	1	Laporan	Tidak terhitung
87.	Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Laporan pengendalian evaluasi dan pelaporan	Tidak tercantum dalam renstra	1	Laporan	Tidak terhitung
88.	Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan monitoring evaluasi dan penyusunan berkala pelaksanaan pembangunan	Tidak tercantum dalam renstra	1	Laporan	Tidak terhitung

Tabel 6.1. Target dan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta Tahun 2022 berdasarkan Renstra

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2023			Presentase Capaian (%)	Predikat
			Target Kinerja	Realisasi	Satuan		
1.	Meningkatnya keberdayaan, produktivitas, dan keunggulan masyarakat	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat	0,01	0,01	%	100	Sangat Berhasil
		Persentase pengangguran yang ditangani	9,17	9,17	%	100	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Daya Saing dan Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat	0,01	0,01	%	100	Sangat Berhasil
3.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja	0	0	%	100	Sangat Berhasil
4.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja	0	0	%	100	Sangat Berhasil
5.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang menyusun RTK Mikro	0	0	Perusahaan	100	Sangat Berhasil
6.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	15,77	9	%	57,07	Cukup Berhasil
7.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (PMDN 86/2017)	15,77	9	%	57,07	Cukup Berhasil
8.	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	35	20	Orang	57,14	Cukup Berhasil
9.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang terakreditasi (PMDN 86/2017)	0	0	%	100	Sangat Berhasil
10.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	0	0	Lembaga	100	Sangat Berhasil
11.	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase LPKS yang memilikizin	50	62,5	%	125	Sangat Berhasil
12.	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	4	5	%	125	Sangat Berhasil
13.	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Perusahaan kecil yang melakukan konsultasi produktivitas	0	0	%	100	Sangat Berhasil

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2023			Presentase Capaian (%)	Predikat
			Target Kinerja	Realisasi	Satuan		
14.	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	0	0	Perusahaan	100	Sangat Berhasil
15.	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0	0	Perusahaan	100	Sangat Berhasil
16.	Pengukuran Kompetensi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah	0	0	Dokumen	100	Sangat Berhasil
17.	Meningkatnya kesempatan kerja	Persentase pengangguran yang ditangani	9,17	9,17	%	100	Sangat Berhasil
18.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja / Pencari Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja di tingkat daerah	0	0	%	100	Sangat Berhasil
19.	Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kerja / pencari kerja yang ditempatkan dalam negeri	0	0	%	100	Sangat Berhasil
		Persentase calon PMI yang mendapatkan rekomendasi paspor	0	0	%	100	Sangat Berhasil
20.	Pelayanan antar kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	500	236	Orang	47,2	Tidak Berhasil
21.	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	0	0	Orang	100	Sangat Berhasil
22.	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	0	0	Orang	100	Sangat Berhasil
23.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah media penyaluran informasi pasar kerja yang terkelola	0	0	Buah/ Tahun	100	Sangat Berhasil
24.	Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair / bursa kerja	0	0	Orang	100	Sangat Berhasil
25.	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota	Persentase calon PMI dan Eks PMI yang dibina	0	0	%	100	Sangat Berhasil

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2023			Presentase Capaian (%)	Predikat
			Target Kinerja	Realisasi	Satuan		
26.	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang diberdayakan	0	0	Orang	100	Sangat Berhasil
27.	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang mempekerjakan TKA yang mendapatkan sosialisasi => 13226	0	0	%	100	Sangat Berhasil
28.	Koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang mempekerjakan TKA yang mendapatkan sosialisasi	0	0	Pelaku Usaha	100	Sangat Berhasil
29.	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-	-	-	-	-
30.	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya kuota program transmigrasi	0	0	%	100	Sangat Berhasil
31.	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	0	0	Kepala Keluarga	100	Sangat Berhasil
32.	Terwujudnya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Berkeadilan	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	0,77	0,77	%	100	Sangat Berhasil
33.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perusahaan/PKB	18	18	%	100	Sangat Berhasil
34.	Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama (PKB)	2	5	%	250	Sangat Berhasil
35.	Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP Online	1	2	Perusahaan	200	Sangat Berhasil
36.	Pendaftaran perjanjian kerja sama bagi perusahaan	Jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerja bersama	0	0	Perusahaan	100	Sangat Berhasil

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2023			Presentase Capaian (%)	Predikat
			Target Kinerja	Realisasi	Satuan		
37.	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HO (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	5	5	Laporan	100	Sangat Berhasil
38.	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus sengketa pengusaha yang terselesaikan	50	50	%	100	Sangat Berhasil
39.	Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	7	15	Perkara	214,29	Sangat Berhasil
40.	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	5	6	Perkara	120	Sangat Berhasil
41.	Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada Organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi	0	0	Asosiasi dan Serikat Pekerja	100	Sangat Berhasil
42.	Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1	1	Lembaga	100	Sangat Berhasil
43.	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	2200	4344	Orang	197,45	Sangat Berhasil
44.	Meningkatnya kualitas dan keefektifitas perencanaan dan pencapaian kinerja perangkat daerah agar efektif dan efisien	Nilai PMPRB	21,15	0	Angka	-	Tidak Berhasil

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2023			Presentase Capaian (%)	Predikat
			Target Kinerja	Realisasi	Satuan		
45.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	65,55	0	Nilai	0	Tidak Berhasil
		Nilai SKM	85	88,86	Angka	104,54	
		Nilai Maturitas Kelembagaan	38	0	Level	0	
		Nilai Maturitas SPIP	1,8	0	Nilai	0	
46.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja berkualitas	50	50	%	100	Sangat Berhasil
47.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	0	0	Dokumen	100	Sangat Berhasil
48.	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	0	0	Dokumen	100	Sangat Berhasil
49.	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	0	2	Dokumen	0	Tidak Berhasil
50.	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	0	0	Dokumen	0	Sangat Berhasil
51.	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	0	2	Dokumen	0	Tidak Berhasil
52.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	5	Dokumen	100	Sangat Berhasil
53.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	0	0	Laporan	100	Sangat Berhasil
54.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	25	25	%	100	Sangat Berhasil
55.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	33	33	Orang/ Bulan	100	Sangat Berhasil

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2023			Presentase Capaian (%)	Predikat
			Target Kinerja	Realisasi	Satuan		
56.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	1	Laporan	100	Sangat Berhasil
57.	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	0	0	Dokumen	100	Sangat Berhasil
58.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	3	3	Laporan	100	Sangat Berhasil
59.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah	25	25	%	100	Sangat Berhasil
60.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	0	1	Dokumen	0	Tidak Berhasil
61.	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	1	1	Dokumen	100	Sangat Berhasil
62.	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	0	0	Dokumen	100	Sangat Berhasil
63.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu	25	25	%	100	Sangat Berhasil
64.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1	1	Paket	100	Sangat Berhasil
65.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	0	0	Orang	100	Sangat Berhasil
66.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3	3	Bulan	100	Sangat Berhasil

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2023			Presentase Capaian (%)	Predikat
			Target Kinerja	Realisasi	Satuan		
67.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	0	0	%	100	Sangat Berhasil
68.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	25	25	%	100	Sangat Berhasil
69.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	0	0	Paket	100	Sangat Berhasil
70.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	0	Paket	0	Tidak Berhasil
71.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1	1	Paket	100	Sangat Berhasil
72.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	0	0	Paket	100	Sangat Berhasil
73.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	0	0	Laporan	100	Sangat Berhasil
74.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3	3	Laporan	100	Sangat Berhasil
75.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	25	25	%	100	Sangat Berhasil
76.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	0	0	Laporan	100	Sangat Berhasil
77.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	0	0	Laporan	100	Sangat Berhasil
78.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	0	0	Laporan	100	Sangat Berhasil
79.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0	0	Laporan	100	Sangat Berhasil

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2023			Presentase Capaian (%)	Predikat
			Target Kinerja	Realisasi	Satuan		
80.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	3	3	Bulan	100	Sangat Berhasil
81.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	0	0	Unit	100	Sangat Berhasil
82.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	0	0	Unit	100	Sangat Berhasil
83.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5	5	Unit	100	Sangat Berhasil
84.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	0	0	Unit	100	Sangat Berhasil
85.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	1	Unit	100	Sangat Berhasil
86.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya terehabilitasi/terpelihara	0	0	Unit	100	Sangat Berhasil

Tabel 6.2. Target dan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta Tahun 2023 berdasarkan Renstra



DINAS TENAGA KERJA KOTA SURAKARTA

Jln. Slamet Riyadi No. 306, Kel. Sriwedari,
Kec. Laweyan, Kota Surakarta 57141

Telp: (0271) 714800

Website: disnaker.surakarta.go.id

Email: disnaker@surakarta.go.id

